Judicial System Monitoring Programme
Programa de Monitorizasaun do Sistema Judisial

www.jsmp.minihub.org

Kasus 11 Februari 2008 :
Lebih Banyak Pertanyaan dari pada Jawaban

Implikasi terhadap Sektor Peradilan di Timor Leste

Februari 2011

Daftar Isi

1. Pendahuluan 7

2. Ringkasan Eksekutif 8

3. Mengenai Sistem Peradilan di Timor Leste 10

3.1 Konstitusi 10

3.2 Presiden 10

3.3 Eksekutif 10

3.4 Peradilan 10

3.5 Badan pembuat undang-undang, hukum dan peraturan 11

4. Konteks dari Kejadian yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2008 13

4.1 Letnan Gastão Salsinha, petisioner dan krisis 2006 di Timor Leste 13

4.2 Mayor Alfredo Reinado Alves 14

4.3 Kejadian 11 Februari 2008 15

4.4 Tanggapan terhadap 11 Februari 2008 15

5. Proses Persidangan 16

5.1 Pujian bagi aktor yudisial dan legal 16

5.2 Investigasi Kejaksaan dan Pemberian Dakwaan 16

5.3 Kasus 11 Februari 2008 di Pengadilan Distrik Dili 17

5.3.1 Sidang Pembuktian 17

5.3.1.1 Pemeriksaan tempat kejadian dan rekonstruksi 17

5.3.1.2 Bukti ahli balistik 18

5.3.2 Tuntutan Akhir 18

5.4 Putusan Pengadilan 19

5.4.1 Temuan-temuan 19

5.4.2 Hukuman 20

5.5 Banding (Peninjauan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama) 21

6. Analisis Persidangan: penyebab keprihatinan dan implikasi terhadap sistem peradilan Timor Leste 22

6.1 Sebuah penyelesaian yang tidak menyakinkan 22

6.2 Kurangnya sumber daya dari kejaksaan 23

6.3 Terdakwa kurang mengakses informasi 24

6.4 Penahanan sementara dan penundaan persidangan 25

6.5 Keamanan tidak memadai untuk pengujung sidang 25

6.6 Masalah-masalah keterangan saksi 26

6.6.1 Kesaksian Palsu 27

6.6.2 Tidak adanya kesaksian dari pejabat tinggi Negara 28

6.7 Persoalan Bahasa 29

6.7.1 Penerjemah 30

6.7.2 Bahasa di pengadilan dan hukum hak asasi manusia internasional 30

6.8 Penyebaran Foto Otopsi Alfredo 31

6.9 Laporan media terhadap kasus 31

6.10 Komentar mengenai kasus oleh pejabat publik 33

6.11 Pemberian pengampunan kepada terpidana 34

7. Rekomendasi 35

8. Kesimpulan 38

9. Lampiran 39

9.1 Kronologis Persidangan 39

9.2 Tabel tersangka, dakwaan, temuan dan hukuman 43

9.3 Kutipan dari aturan perundang-undangan yang relevan 47

9.3.1 ICCPR 47

9.3.2 Konstitusi RDTL 49

9.3.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 50

9.3.4 Timorese Criminal Code 52

9.3.5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste 53

9.3.6 Regulasi UNTAET No. 56 of 2001 53

9.3.7 Law No. 5/2004 on the Status of Members of Parliament 53

9.4 Bibliografi dan bacaan lanjutan 54

9.4.1 Instrumen Internasional 54

9.4.2 Instrumen Hukum Nasional Timor Leste 54

9.4.3 Laporan-laporan JSMP 54

9.4.4 Atikel, laporan-laporan dan sumber lain 55

Akronim

AFP	*Australian Federal Police* (Polisi Federasi Australia)
F-FDTL	*FALINTIL-Forças de Defesa de Timor Leste* (Pasukan Pertahanan dan Keamanan Timor Leste)
FRETILIN	*Frente Revolutionaria do Timor Leste Independente* (Front Pembebasan Kemerdekaan Timor Leste)
ICCPR	*International Convention on Civil and Political Rights* (Konvenan Interansional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik)
ICESCR	*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
GNR	*Guarda Nacional Republicana* (Unit Polisi Para Militer Portugal)
KII	*Komisaun Inkeritu International* (Komisi Penyelidikan Internasional)
MP	*Ministériu Públiku* (Kantor Kejaksaan Agung)
MUNJ	*Movimentu Unidade Nasional ba Justisa* (Persatuan Pergerakan Nasional untuk Keadilan)
PNTL	*Polícia Nacional de Timor Leste* (Polisi Nasional Timor Leste)
PSD	*Partido Social Democrático* (Partai Sosial Demokrat)
RDTL	*República Democrática de Timor Leste* (Nama resmi Timor Leste)
UDHR	*Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
UIR	*Unidade Intervenção Rápido* (Polisi Unit Gerak Cepat)

UNDP	*United Nations Development Program* (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UNPOL	*United Nation Police* (Polisi PBB)

1. Pendahuluan

Kasus 11 Februari 2008 mengenai percobaan pembunuhan terhadap Kepala Negara (Jose Manuel Ramos Horta) dan Kepala Pemerintahan (Jose Alexandre Kay Rala Xanana Gusmão) sangat penting, juga merupakan sebuah kasus yang ternama, kasus hukum yang terjadi dalam sejarah Timor Leste. Akan tetapi sampai saat ini belum ada laporan lengkap mengenai kejadian tersebut dan persidangannya.

Pada perayaan ketiga dari kejadian itu, JSMP sangat prihatin bahwa meskipun setelah proses peradilan yang lama, masyarakat sebagian besar masih dalam kegelapan mengenai beberapa persoalan seputar peristiwa itu, termasuk siapa yang menembak presiden, dan siapa yang menembak Mayor Alfredo Alves dan pengawalnya Leopoldino Exposto. Dalam laporan ini diharapkan untuk dapat memisahkan antara hal-hal yang bersifat fakta dan hal-hal yang bersifat fiksi seperti apa yang diceritakan oleh kebanyakan orang. Dan laporan ini juga sangat penting karena merupakan premis awal guna melihat secara mendalam dan detail terhadap proses peradilan sehingga membantu kita untuk melakukan evaluasi dan pengujian terhadap upaya actor peradilan dalam mencari kebenaran ditengah kompleksitas semacam ini.Pemantauan JSMP dan isi dari laporan ini berkaitan dengan persidangan pada tingkat pertama, yang dilakukan oleh pengadilan Distrik Dili.[1]

Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja sistem peradilan Timor Leste yang berkaitan dengan prinsip-prinsip peradilan adil. Timor Leste telah meratifikasi beberapa konvensi internasional;[2] beberapa dari instrument hukum internasional ini dan kesepakatan-kesepatan, termasuk pasal 14 dari ICCPR, menjelaskan bagaimana mengadakan persidangan adil tanpa mengurangi hak-hak orang yang terleibat dalam kasus tertentu.

Laporan ini berisi 8 bagian dan satu lampiran. Setelah pendahuluan dan ringaksan eksekutif, bagian 3 dan 4 memberikan gambaran singkat mengenai konteks politik dan hukum yang relevan di Timor Leste, untuk membantu baik pemahaman terahadap kasus 11 Februari 2008 dan apresiasi akan pentingnya persidangan. Bagian 5 menjelaskan pelaksanaan persidangan, dan bagian 6 mengarisbawahi beberapa persoalan sistem peradilan yang muncul dalam kasus ini. Akhirnya, rekomendasi dan kesimpulan JSMP dapat ditemukan pada bagian 7 dan 8.

---

[1] Persidangan dilakukan oleh panel yang terdiri dari tiga orang hakim, hakim ketua Constâncio Basmery, Antonino Gonçalves dan Deolindo dos Santos; putusan yang dijatuhkan pada tanggal 3 Maret 2010 (Proc. No. 79/C.Ord/TDD/2009).

Banding lanjutan (memeprkuat putusan peratama) tidak terbuka untuk umum , akan tetapi putusanyang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 14 Juni 2010 (Proc. No. 2424/CO/2010/TR) telah dipertimbangkan dalam analisis di sini. Hakim Pengadilan Tinggi menyidangkan kasus tersebut adalah Claudio Ximenes, José Luis da Goia dan Rui Manuel Barata Penha.

Silakan kontak JSMP untuk mendapatkan salinan putusan (keduanya di dalam Bahasa Portugis).

[2] Diantaranya ICCPR dan Protokol Opsional 1 dan 2. See http://www.adh-geneve.ch/RULAC/international_treaties.php?id_state=219 untuk dapat lengkap.

2. Ringkasan Eksekutif

Pemantauan JSMP terhadap proses persidangan kasus 11 Februari, di satu sisi telah menunjukkan kemampuan sistem peradilan Timor Leste – dan kemauan hakum nasional – untuk menanggani kasus yang berprofil besar; di sisi lain serangkaian masalah dan keperluan mendesak untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan.

Pada tanggal 11 Februari 2008 tidak terlepas dari kerusuhan sipil 2006 yang mengoyangkan Timor Leste dan dalam hal ini, persidangan tersebut juga menandai kontribusi yudisial dalam menyelesaikan krisis. Kasus yang melibatkan banyak aktor peradilan, juga melibatkan beberapa aktor non-yudisial:

- 28 orang terdakwa[3]
- Hakim Pengadilan Distrik Dili (dan kemudian Pengadilan Tinggi);
- Kantor Kejaksaan Agung (Ministériu Públiku), termasuk jaksan internasional yang ditugaskan untuk kasus ini ;
- Pengacara bagi terdakwa, termasuk pembela umum;
- Sekitar 120 orang saksi;
- Penerjemah Pengadilan;
- Personel Keamanan dari PNTL dan GNR ;
- Pejabat Tinggi, termasuk Presiden dan Perdana Menteri; dan ,
- Media cetak dan televisi nasional dan internasional.

Laporan ini menemukan bahwa pasal 14 mengenai hak atas peradilan adil, tertera dalam ICCPR, berkenaan dengan semua aktor ini, yang berdampak pada sejauh mana jaminan tersebut dapat dipenuhi. Pelaksanaan persidangan atas kasu 11 Februari telah melanggar hak ini dalam beberapa hal.

Kurangnya sumber daya yang diahdapi oleh kejaksaan merupakan salah satu faktor waktu yang begitu lama antara kejadian, dimulainya persidangan, dan berakhirnya persidangan. Hal ini memberikan beban yang tidak adil bagi terdakwa misalnya memperpanjang jangka waktu dalam penahanan pra-sidang, pengungkapan dokumen yang tidak memadai dan tuntutan dari kejaksaan

[3] Ada banyak lagi pelaku, namun 28 orang yang pada akhirnya didakwa. Semuanya adalah mantan militer F-FDTL, kecuali Angelita Pires yang merupakan warga Negara Timor-Australia adalah orang sipil. Lihat lampiran 9.2 tentang daftar lengkap dari terdakwa dalam kasus ini.

tanpa bukti yang minimal. Salah satu halangan terbesar , dan selalu timbul di Timor Leste adalah bahasa dan penerjemahan – merupakan sumber dari penundaan dan kebingungan.

Keamanan yang tidak memadai bagi mereka yang mengikuti persidangan dan kemungkinan pemberian pengampunan telah membahayakan pencarian kebenaran. Penahanan sementara, penyebaran foto otopsi, dan beberapa komentar mengenai kasus oleh pejabat publik telah menimbulkan persoalan etika dan moral.

Bukti, termasuk keterangan saksi, harus ditangani dengan lebih efisien dan hati-hati, agar dapat mencegah kerusakan dan hilangnya informasi, pemborosan waktu, dan fakta-fakta yang membingungkan. (pertimbangan atau sebaliknya). Penting bahwa informasi yang relevan dapat diperoleh dan dapat diberikan kepada kedua pihak sehingga mereka memiliki kesempatan baik untuk menyiapkan kasus mereka, dan informasi yang tidak relevan dapat dikeluarkan. Sayangnya, hal ini seringkali tidak dilakukan dalam persidangan 11 Februari 2008.

Investigasi dan proses persidangan yang panjang, dan pertanyaan penting masih belum terjawab meskipun setelah dilakukan banding akhir, mengindikasikan adanya masalah kemampuan. Sistem peradilan Timor Leste masih dalam proses pengembangan, dan membutuhkan sumber daya yang banyak, dan diperlukan kordinasi dan kerja sama antara para aktor dalam sistem peradilan.

Intervensi dan tantangan dalam persidangan, dan ketidak jelasan fakta dan keyakinan, menunjukkan perlunya sebuah apresiasi yang besar terhadap penegakkan prinsip Negara hukum: otoritas yudisial dan kemandirian, pemisahan kewenangan, dan penghormatan hak asasi manusia. Mendukung, mempercayai, pengadilan bukan dengan kegagalan persidangan untuk menyelesaikan persoalan utama: masih ada misteri dibalik apa yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2008.

Dengan melihat persoalan ini, JSMP menarik enam belas rekomendasi penting. Ditujukan untuk berbagai aktor, dan menanggapi berbagai elemen dari proses yudisial, dengan tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan keadilan.

3. Mengenai Sistem Peradilan di Timor Leste

Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugis pada tanggal 28 November 1975, akan tetapi hanya baru diakui secara internasional sebagai sebuha negera yang berdaulat pada tanggal 20 Mei 2002, setelah memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia melalui Referendum yang selenggarakan pada tahun 1999.

3.1 Konstitusi

Konstitusi Demokratik Republik Timor Leste, berdasarkan model Portugis, yang diberlakukan pada tanggal 22 Maret 2002. Konstitusi tersebut mengatur organisasi politik dan kewenangan hukum, dan termuat jaminan atas hak-hak politik dan sipil, serta sosial, ekonomi dan kultural. Ada empat badan kedaulatan dalam system pemerintahan Timor Leste, Presiden Republik, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

3.2 Presiden

Presiden adalah Kepala Negara, yang dipilih oleh suara mayoritas untuk masa jabatan lima tahun. Kewenangan Presiden tertera dalam Konstitusi, akan tetapi tugas sebagianya sebagai simbolik.

3.3 Eksekutif

Perdana Menteri adalah Kepala Pemerintahan. Setelah dilakukan pemilihan legislatif, Presiden mengangkat pemimpin dari partai mayoritas dalam Parlemen Nasional sebagai Perdana Menteri. Pemerintah juga termasuk Para Menteri, dan Sekretaris Negara.

3.4 Peradilan

Sebagaimana diatur dalam pasal 118 dan 119 Konstitusi, pengadilan memiliki kompetensi untuk memproses semua kasus sesuai dengan Konstitusi. Ada juga ketentuan mengenai Mahkamah Agung yang akan didirikan, tetapi sebelum sampai dibentuknya pengadilan tersebut, Pengadilan Banding adalah otoritas yudisial tertinggi, dan melaksanakan kewenangan Mahkamah Agung.[4]

---

[4] Otoritas ini dalan pengaturan transisional tertera dalam pasal 164.2.

Sesuai dengan Regulasi UNTAET 2000/11, didirikannya empat Pengadilan Distrik diantaranya di Dili, Baucau, Suai dan Oecusse, dan pengadilan Distrik tambahan dapat didirikan sesuai dengan pasal 131.1 Konstitusi. Proses pidana dan perdata dilakukan di pengadilan tersebut, yang memiliki yuridiski territorial terhadap "sebagai pengadilan tingkat pertama".[5] Pengadilan Distrik Dili melakukan yuridiksi teritorial secara reguler sebagai pengadilan tingkat pertama dalam kasus Februari 2008.[6]

Proses persidangan dilakukan dalam Bahasa Portugis, yang diterjemahkan oleh penerjemah dari dan kedalam Tetum dan bahasa lain yang dipakai di pengadilan. Bahasa Indonesia dan Inggris juga merupakan bahasa kerja. Kadang-kadang diperlukan untuk menerjemahkan dari Tetum ke Bahasa lokal lainnya, dan sumber daya untuk menyediakan pelayanan semacam ini merupakan satu tantangan yang tengah dihadapi oleh system peradilan pada saat ini.

Kemampuan akan hukum juga masih terbatas, dan masih terus diperlukan bantuan hakim internasional dan penasehat.

3.5 Badan pembuat undang-undang, hukum dan peraturan

Parlemen Nasional adalah sebuah badan tunggal yang beanggotakan antara 52 dan 65 orang yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun.[7] Badan ini berwenang untuk membuat undang-undang yang meliputi masalah-masalah kebijakan nasional dan internasional sebagiamana tertuang dalam Konstitusi, pasal 95 dan , berdasarkan pasal 96.1, dapat mengijinkan pemerintah untuk merancang undang-undang untuk topik-topik tertentu, termasuk:

a) Definisi Kejahatan, hukuman, tindakan pengamanan dan masing-masing syarat-syarat;

b) Definisi proses pidana dan perdata;

c) Organisasi yudisial dan status kehakiman

Anggota Parliament, fraksi parlementar dan Pemerintah dapat mengajukan udnang-undang ke Parlemen.[8] Undang-undang disahkan oleh Parlemen yang kemudian diberlakukan oleh Presiden, kecuali ia memutuskan untuk mengunakan hak veto sesuai dengan pasal

Pada bulan Maret 2009, pemberlakuan KUHP Timor Leste mengantikan KUHP Indonesia. Untuk kasus-kasus tersebut masih tetap disidangkan setelah tanggal itu, tetapi mengenai peristiwa yang

---

[5] Regulasi UNTAET 2000/11, pasal 6.

[6] Dicatat bahwa Pengadilan Distrik Dili juga memiliki yuridiksi tambahan untuk mengadili "kejahatan berat".

[7] Konstitusi Timor Leste, pasal 93.

[8] Konstitusi Timor Leste, pasal 97.

terjadi sebelum Maret 2009, KUHP Timor Leste menerapkan sistem retrospektif, kecuali tidak menguntungkan terdakwa, dimana dalam kasus ini diterapkannya KUHP Indonesia.[9] Demikian pula, KUHAP Timor Leste diberlakukan pada bulan Maret 2006 dan mengatur pelaksanaan persidangan.

Ada hubungan dengan yurisdiksi perdata KUHPerd Indonesia masih tetap diimplementasikan dalam persidangan akan tetapi dimasa depan kita berharap aka nada KUHPerd Timor Leste yang berdasarkan pada undang-undang Portugal.

[9] KUHP Timor Leste, pasal 3.

4. Konteks dari Kejadian yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2008

4.1 Letnan Gastão Salsinha, petisioner dan krisis 2006 di Timor Leste[10]

Gastão Salsinha telah terlibat dalam perlawanan FALINTIL terhadap pendudukan Indonesia, dan bergabung dalam militer setelah kemerdekaan. Ia dipromosikan menjadi Letnan, tetapi kemudian menjadi tidak puas dengan pemimpin tertentu dalam tubuh F-FDTL yang mengatakan bahwa mereka yang berasal dari wilayah barat tidak terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Ia juga bermasalah dengan Komandan Taur Matan Ruak mengenai sanksi yang diberikan kepadanya karena menyelundup kayu cendana.

Akibatnya, Salsinha memimpin 159 anggota F-FDTL yang dikenal sebagai Petisi, penyebab krisis 2006. Para petisioner tidak puas dengan hirarki F-FDTL karena adanya diskriminasi terhadap anggota militer yang berasal dari wilayah barat Timor Leste dalam hal perekrutan, pengangkatan, dan pemberian sanksi. Pada tanggal 9 Januari 2006, mereka menyerahkan sebuah petisi yang telah ditanda tangani kepada Presiden Gusmão (sebagai panglima tertinggi) dan memberikan salianan kepada pemimpin politik, diplomatik dan agama.

Usaha-usaha negosiasi dilakukan dengan melibatkan para petisioner, F-FDTL dan Presiden tidak berhasil dan jumlah petisioner bertambah. Diyakini pemerintah tidak menanggapi keluhan mereka, kelompok Salsinha berjumlah 593[11] dari 1400 pasukan F-FDTL meninggalkan asrama mereka Pada tanggal 6 Maret 2006, , Taur Matan Ruak memecat militer yang membelot. Tanggapan Presiden mengritik F-FDTL dengan tajam dalam pidatonya di Televisi, yang memancing ketegangan selanjutnya.

Pada bulan April para petisioner kemudian memimpin demonstrasi terhadap pemerintah, yang kemudian meningkatnya kekerasan dengan cepat, khususnya di Dili, dan menganggu stabilitas di Timor Leste. Sesuai dengan perkiraan, orang yang kehilangan tempat tinggal sekitar 150 000 orang dan paling tidak 37 orang terbunuh

---

[10] Untuk peninjauan lengkap lengkap dari Petisi dan krisis 2006, lihat, misalnya Laporan Komisi Penyeledikan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timor Leste (2 Oktober 2006), Update Keadilan JSMP "Tanggapan JSMP Laporan Komisi Penyeledikan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timor Leste " (Terbitan No. 14, Oktober 2006), dan Laporan International Crisis Group's Asia Report No. 120 "Menyelesaikan Krisis Timor Leste" (10 October 2006). Informasi dalam sub bagian ini diambil dari sumber-sumber ini.

[11] Awalnya militer yang menandatangani petisi berjumlah 591, dan dua orang lainnya kemudian memasukan nama mereka pada petisi tersebut. Sebagian media melaporkan jumlahnya sampai 600. Sebagian petisioner berasal dari Distrik Dili, Ermera, Bobonaro, Ainaro, Same, Suai, Aileu, Manatuto, Liquiça dan Oecusse.

4.2 Mayor Alfredo Reinado Alves[12]

Mayor Alfredo Reinado Alves adalah seorang Komandan Polisi Militer dalam F-FDTL dan Komandan Angkatan Laut yang pada tanggal 3 Mei 2006, ia dan anak buahnya berjumlah tujuh belas orang dan bersama dengan empat orang anggota Unit Gerak Cepat (UIR), membelot untuk mendukung para petisioner. diduga terlibat dalam kematian sejumlah anggota F-FDTL selama penyerangan di Fatu-Ahi pada tanggal 25 April 2006. Persidangan terhadap kejadian ini telah mendapatkan putusan pada bulan September 2010 sedang disidangkan di pengadilan Distrik Dili.[13]. Setelah memimpin kelompok petisioner, Pada tahun yang sama, pada bulan juli, Reinaldo ditangkap di Bairro Pité, Dili atas kepemilikan senjata secara illegal. Ia dibawa ke pengadilan dan ditahan sementara bersama dengan anak buahnya. Akan tetapi, ketika sedang menunggu persidangan dalam penahanan sementara , Reinado dan anak buahnya melarikan diri dari penjara Becora dan berdiam di wilayah bagian Barat Timor Leste sebagai pasukan gerilia untuk menunggu penyelsaian yang memuaskan atas keluhan mereka.

Pada tahun bulan Maret 2007 Pasukan Australian (Special Air Service Regiment/SAS) mencoba untuk menangkap Reinado, pada saat ia tinggal bersama dengan pendukungnya di Same. Salah satu anggota kelompok Reinado terbunuh dalam operasi tersebut, akan tetapi Reinado dan anggotanya yang lain dapat melarikan diri.

Setelah usaha penangkapan terhadap Reinado dan kelompoknya gagal, Presiden Ramos Horta berusaha untuk memulai proses dialog dengan Reinado dan kelompoknya, dan memberikan surat ijin bebas melakukan perjalanan kemana saja dalam teritori, guna untuk menfasilitasi Reinado dalam negosiasi dengan pihak pemerintah. Presiden membentuk forum nasional dengan nama Movimentu Unidade Nasional no Justisa (MUNJ) untuk memfasilitasi proses negosiasi ini. Presiden bertemu dengan Reinado dan anak buahnya beberapa kali di Ermera antara April 2007 sampai pada hari penembakan Reinado.

---

[12] Lihat Update Keadilan, "Kasus Alfredo Reinado" (terbitan No. 8, meliputi periode July 2006), ada di Website JSMP pada: http://www.jsmp.minihub.org di folder "Publications", untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kejadian, dan analisis dan implikasinya .

[13] Lihat Update Keadilan pada bulan Desember 2010 "Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lemah pelaku kasus Fatu-Ahi bebas murni"

4.3 Kejadian 11 Februari 2008[14]

Proses negosiasi tidak berjalan dengan mulus dan pada tanggal 11 Februari 2008 beredar informasi bahwa Reinaldo telah menyerang Presiden (Sekarang Ramos-Horta)[15] di kediamannya di Metiaut, Dili, yang mengakibatkan Presiden luka parah, dan Reinado dan pengawalnya Leopoldino Exposto juga mati tertembak pada kejadian itu .

Pada hari yang sama, sekelompok orang yang dipimpin oleh Salsinha menghadang konvoy Perdana Menteri Gusmão di Balibar. Tidak ada yang terluka, akan tetapi mobil yang ditumpanggi mengalami kerusakan berat karena akibat dari penembakan itu.

Sebelum persidangan dilakukan, muncul fakta-fakta yang tidak jelas. Banyak orang yang memberitahu media bahwa Reinado tidak menyerang Presiden dan yang lain mengatakan bahwa Reinaldo dan anak buahnya datang untuk mengadakan pertemuan setelah dihubunggi oleh Presiden. Hal ini memunculkan teori konspirasi dan mencampuri kepentingan media dalam persoalan tersebut.

4.4 Tanggapan terhadap 11 Februari 2008

Setelah kejadian tersebut pemerintah mengumumkan Negara dalam keadaan darurat untuk membatasi pergerakan warga Negara; hal ini tetap berlaku sampai tanggal 22 April 2008.[16]

Tidak lama setelah penyerangan, Perdana Menteri membentuk sebuah operasi gabungan yang melibatkan F-FDTL dan PNTL. Tujuannya untuk meyakinkan mereka yang di bawah komandan almarhum Alfredo Reinado yang waktu itu melarikan diri ke hutan untuk turun ke Dili dan tunduk pada proses hukum. Operasi gabungan tersebut dilakukan selama empat sampai lima bulan, yang pada akhirnya masing-masing dari mereka yang terlibat dalam penyerangan tersebut menyerahkan diri kepada otoritas. Pemerintah mengatakan bahwa operasi ini berhasil karena berakhir dengan tanpa ada tembakan yang dikeluarkan dan tidak ada kobran.

Bagian berikutnya dimuat dengan sebuah analisis persidangan yang dipantau.

---

[14] Tolong merujuk pada siaran pers dan update keadilan mengenai percobaan pembunuhan terhadap Presiden dan Perdana Menteri melalui: http://www.jsmp.minihub.org, di folder "Publications".

[15] Pada bulan Juli 2007, Jose Ramos-Horta terpilih menjadi Presiden Timor Leste, dan mengangkat Xanana Gusmão (Presiden aktual) sebagai Perdana Menteri . Mereka pada saat itu masih aktif menjalankan tugas-tugasnya pada saat penyerangan 11 Februari .

[16] Distrik Ermera, dimana para pemberontak diyakini bersembunyi, terus dalam keadaan darurat setelah tanggal ini. Lihat Laporan Unit Intelijen Ekonomis mengenai Timor Leste (April 2008).

5. Proses Persidangan

5.1 Pujian bagi aktor yudisial dan legal

JSMP bangga dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh semua institusi yudisial, khususnya Pengadilan Distrik Dili, yang mana memiliki yuridiksi untuk mengadili kejahatan yang dilakukan selama krisis 2006. Meskipun ada keprihatinan mengenai beberapa persoalan substansial, JSMP yakin bahwa pengadilan telah benar-benar menunjukkan komitmennya untuk melakukan tanggungjawab institusional sesuai dengan Konstitusi, dan bekerja sama dan mendukung serta menegakkan Negara hukum di Timor- Leste.

Dengan diselesaikannya persidangan ini, pengadilan telah memperkuat posisinya, menyelesaikan tantangan institusional yang muncul sejak awal. Hal ini tidak gampang untuk mengadakan persidangan yang melibatkan pejabat tinggi dan beberapa anggota militer serta polisi, dan pengadilan perlu dipuji karena dapat mengatur tugas rumit ini. Pengadilan Distrik Dili tidak hanya memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas laboratorium forensik untuk menguji bukti-bukti yang berkaitan dengan kejahatan 2006, namun aktor pengadilan sendiri mendapatkan pengamanan yang terbatas, serta tekanan sosial dan psikologi yang berkaitan dengan kasus yang mereka tanggani. Mereka juga mendapat tekanan langsung maupun tidak langsung dan pengaruh yang diberikan oleh beberapa otoritas politik.

Meskpiun demikian,mereka pantas dipuji atas dedikasi, komitmen dan motivasi institusional untuk memikul beban dan tanggungjawab, khususnya kasus yang begitu kompleks.

JSMP yakin bahwa pihak-pihak lain juga pantas mendapatkan apresiasi, diantaranya Kejaksaan, pengacara (secara individu dan kolektif), saksi, terdakwa, panitera, anggota PNTL dan GNR Portugal yang telah menyediakan keamanan selama proses berlangsung, juga anggota F-FDTL, media nasional dan internasional yang terlibat dan memberikan kontribusi kepada proses tersebut. Tanpa masukan dan kerja sama mereka, pengadilan tidak dapat berhasil menyelesaikan tugasnya.

5.2 Investigasi Kejaksaan dan Pemberian Dakwaan

Kejaksaan menugaskan seorang jaksa internasional, , Felismino Cardoso untuk menanggani kasus tersebut. Sementara otoritas terus mencoba untuk meyakinkan pemberontak yang terlibat dalam penyerangan tersebut untuk menyerahkan diri, sementara kejaksaan melakukan investigasi yang berlarut-larut.

Pemerikasaan tempat kejadian dilaksanakan setelah seminggu setelah peristiwa 11 Februari, yang berarti bahwa banyak bukti berharga yang kemungkinan hilang atau rusak. Berdasarkan laporan media, banyak F-FDTL dan UNPOL merusak tempat keajdian perkara pada hari itu, mengambil foto dengan mayat Reinado, yang mana mereka juga memindahkanya untuk pengambilan foto.

Kejaksaan memberikan berbagai dakwaan kepada 28 orang terdakwa.[17] Hal ini tidak hanya berkaitan dengan percobaan pembunuhan terhadap Presiden, Perdana Menteri, anggota militer F-FDTL, tetapi juga merusak kendaraan Perdana Menteri, dan pengunaan senjata secara illegal. Dakwaan tersebut sebagian berdasarkan KUHP Indonesia, sementara satu dakwaan yang diambil dari KUHP Timor Leste dan Regulasi UNTAET.

5.3 Kasus 11 Februari 2008 di Pengadilan Distrik Dili [18]

Persidangan ini dimulai pada tanggal 13 Juli 2009,[19] dan disambut baik dengan antusias oleh banyak orang, termasuk media nasional dan internasional, keluarga dan simpatisan terdakwa.

Tinjaun berikut ini berdasarkan pemantauan JSMP terhadap pemantauan persidangan.

5.3.1 Sidang Pembuktian

Sidang pemberian kesaksian dari terdakwa, saksi ahli dan saksi lain memakan waktu yang lama, dimulai pada bulan Juli 2009 dan berakhir pada bulan Februari 2010. Lebih dari seratus saksi yang terlibat dalam persidangan tersebut.

Pada persidangan pertama tak satu pun terdakwa yang ingin memberikan kesaksian di Pengadilan mengenai bukti-bukti yang dihadirkan oleh kejaksaan terhadap mereka. Terdakwa melakukan haknya untuk tetap diam dan hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum untuk mendengarkan keterangan saksi.

Selama persidangan, beberapa masalah mengenai pemberitahuan saksi, ketidakhadiran di pengadilan, dan kuantitas dan relevansi kesaksian yang diberikan menjadi jelas. Pertukaran pengacara juga terjadi karena berbagai alasan di persidangan.

5.3.1.1 Pemeriksaan tempat kejadian dan rekonstruksi

Setelah mendengarkan semua keterangan saksi (kecuali bukti ahli), pengadilan mengadakan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan rekonstruksi di kediaman Presiden pada tanggal 1 Februari 2010, dan di Balibar pada tanggal 2 Februari. Polisi dan pengadilan tidak mengijinkan publik untuk mengambil bagian dalam inspeksi dan menyuruh mereka untuk berada pada jarak yang layak.

---

[17] Lihat lampiran 9.2 untuk mendapatkan daftar terdakwa yang lengkap, dakwaan, temuan-temuan dan hukuman.

[18] Lihat lampiran 9.1 mengenai tinjauan setiap persidangan berdasarkan pemantauan JSMP.

[19] Lihat siaran pers JSMP PADA Juli 2009, ada dalam bahasa Tetum dan Bahsa Indonesia di Situs http://www.jsmp.minihub.org under “Publications”.

5.3.1.2 Bukti ahli balistik

Pada tanggal 8 Febuari pengadilan mendengarkan kesaksian dari seorang ahli yang telah melakukan uji balistik di laboratorium Australia. Ahli tersebut mengatakan bahwa peluru yang melukai Presiden dan membunuh Reinado dan Leopoldino bukan ditembakan dari salah satu senjata yang diserahkan oleh terdakwa atau F-FDTL untuk diperiksa .[20] Ada kemungkinan bahwa F-FDTL masih belum menyerahkan senjata yang ditembakan pada tanggal 11 Februari 2008, meskipun mereka berulangkali diminta oleh jaksa.

Selanjutnya – bertentangan dengan argumen-argumen dari kejaksaan dan kesaksian dari pengawal Presiden Francisco Lino Marçal, yang mengatakan bahwa ia menembak kedua orang tersebut – laporan otopsi menunjukkan luka tembak yang diderita oleh Reinado dan Exposto ditembakan pada jarak dekat, dan bukan dari jarak jauh.

5.3.2 Tuntutan Akhir

Sehubungan dengan serangan terhadap konvoi mobil Xanana, ahli balistik menyatakan peluruh tidak berasal dari senjata dari para terdakwa, sebaliknya jenis pelurunya sama dengan yang digunakan oleh anggota UNPOL dan PNTL yang mengawal Perdana Menteri pada saat itu. Ahli balistik juga mengatakan dalam kesaksiannya bahwa setidaknya beberapa tembakan berasal dari dalam mobil.Tuntutan akhir

Pada tanggal 11 Februari 2010 pengadilan menjadwalkan untuk mendengarkan rekomendasi akhir kejaksaan dalam kasus tersebut. Akan tetapi, kejaksaan memasukan dua dokumen terbaru – salah satunya berisi kesaksian penting dari Presiden Horta dan yang lainnya berisi kesaksian tertulis yang diberikan oleh Perdana Menteri Gusmão. Kejaksaan sebelumnya diminta mengenai kesaksian mantan Komisaris Polisi Paulo Martins dan mantan Mayor Agostu "Tara" de Araújo, akan tetapi tidak dilakukannya, dan pengadilan akhirnya tidak melanjutkan kasus itu.

Pengadilan mendengarkan rekomendasi akhir dari kejaksaan pada tanggal 16 Februari 2010. Kejaksaan mempertahankan dakwaan awal, hanya merubah dakwaan yang berkaitan dengan konspirasi karena kurang ada bukti. Kejaksaan mengatakan bahwa telah terbukti bahwa terdakwa telah merampas senjata dari mereka yang bertugas di kediaman Presiden, dan juga telah terbukti

---

[20] Lihat komentar pada Laporan Uji Balistik dari AFP : "AATL Ejiji Tribunal Reezame Kilat Musan Tiru Major Alfredo", *Suara Timor Lorosa'e*, 10 February 2010, pages 1, 15; Adam Gartrell, "Timorese assassin plot doubt – Aussie expert testifies", *Daily Telegraph*, 13 February 2010, page 38; and Paul Toohey, "Guard's gun didn't kill rebel –AFP report will rock Dili trial of Reinado's lover", *The Australian*, 20 July 2009, page 6.

Militer F-FDTL menggunakan senjata dengan jenis FNC dan M16, dan para pemberontak membawa senjata HK33; dari ketiga senjata tersebut diatas semuanya menggunakan peluru 5.56mm NATO , akan tetapi tidak Reinado dan tidak juga Exposto (yang mana meninggal karena peluru yang berbeda dan dari senjata yang berbeda pula) mereka semua tidak meninggal karena peluru tersebut. Presiden tertembak dengan peluru 5.56mm , akan tetapi pengadilan tidak dapat mengidentifikasi penembaknya dan senjata yang dipakai untuk menembaknya.

bahwa terdakwa menunjukkan niat untuk membunuh Perdana Menteri karena mereka telah menyerang dan menembaki konvoi Perdana Menteri di Balibar.

Pembela Umum, Andre Peixoto Fernandes mengatakan bahwa bukti tersebt tidak membuktikan bahwa Salsinha dan anak buahnya memiliki niat tertentu untuk menembak, dan dapat dikatakan bahwa mereka kebetulan berada pada tempat tersebut pada waktu tersebut. Ia kemudian merekomendasikan bahwa semua 28 orang terdakwa dibebaskan berdasarkan kurangnya bukti.[21]

5.4 Putusan Pengadilan[22]

Setelah selang waktu beberapa bulan, Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan putusannya pada tanggal 3 Maret 2010. Banyak keluarga terdakwa dan simpatisan lain, serta pengamat dan anggota media nasional dan internasional yang hadir untuk mendengarkan pembacaan putusan tersebut. Pengadilan dijaga ketak oleh anggota Polisi PBB (GNR) dan PNTL.

5.4.1 Temuan-temuan

Setelah pengujian bukti-bukti, keterangan saksi, bukti dokumental, bukti ahli, dan pengujian balistik, pengadilan memutuskan bahwa bukti kuat dihadirkan oleh kejaksaan yang berkaitan dengan tuduhan pidana terhadap terdakwa.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa dalam kelompok bersama dengan alamarhum Reinado datang dari Laulara, memakai seragam militer lengkap dan membawa senjata secara ilegal ke kediaman Presiden. Ditemukan juga bahwa terdakwa terlibat dalam merencanakan untuk melakukan dua serangan. Satu diataranya dilakukan di kediaman Presiden di Metiaut, Dili dan satu lainnya dilakukan terhadap konvoi Perdana Menteri di Balibar.

Akan tetapi, pengadilan tidak membuktikan siapa yang melukai Presiden dan Celestino Gama, atau siapa yang menembak Perdana Menteri. Pengadilan juga tidak membuktikan bahwa saksi Lino Marçal yang menembak mati Reinado dan Exposto, meskipun sudah jelas mereka mati setelah memasuki kediaman Presiden, dan sebelum Presiden tertembak.

---

[21]Sidang akhir atas penyerangan dan penembakan atas Ramos-Horta dan Xanana "Julgamento do atentado contra Ramos-Horta e Xanana na fase final", *iOnline*, 11 Februari 2010. Dicatat bahwa 28 terdakwa memiliki pengacara yang berbeda, meskipun Peixoto Fernandes mewakili beberapa dari mereka secara kolektif .

[22] Proc. No. 79/C.Ord/TDD/2009. Lihat juga siaran Pers JSMP, "Putusan Final yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap kasus 11 Februari gagal membuktikan siapa yang menembak Presiden Republik" (Maret 2010), ada pada situs JSMP http://www.jsmp.minihub.org pada "Publications".

Dua puluh delapan orang terdakwa disidangkan oleh pengadilan; akan tetapi hanya 24 orang yang dinyatakan bersalah atas salah satu tuntutan yang diberikan kepada mereka. Terdakwa dituntut sebagai pelaku utama dalam konspirasi untuk melakukan serangan dan percobaan pembunuhan; meskipun pengadilan membebaskannya, bersama dengan tiga orang terdakwa lainnya,[23] dari semua tuduhan terhadap mereka karena kurang bukti. Para Terdakwa juga dibebaskan dari beberapa tuduhan.

5.4.2 Hukuman[24]

Gastão Salsinha dijatuhi hukuman sepuluh tahun delapan bulan karena memimpin kelompok bersenjata dalam penyerangannya terhadap Perdana Menteri[25] dan percobaan pembunuhan terhadap dua orang pengawal Perdana Menteri,[26] pengunaan senjata secara illegal[27] dan pengrusakan barang-barang.[28]. Mereka yang bersama dengan Salsinha[29] ketika konvoi Perdana Menteri diserang dan ditembak di Balibar dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut. Mereka masing-masing menerima hukuman Sembilan tahun dan empat bulan penjara.

Amaro da Costa dan Sembilan terdakwa lainnya [30] yang bersama dengan Alfredo Reinado dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan divonis 16 tahun penjara atas percobaan pembunuhan terhadap Kepala Negara[31], dan percobaan pembunuhan terhadap pengawal pada kediamana Presiden[32], Juga pengunaan senjata secara ilegal.[33]

Sesuai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste, pengadilan tidak memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perakara.

---

[23] Tito Tilman, João Amaral Bere, dan Alfredo de Andrade, semuanya adalah mantan anggota F-FDTL.

[24] Lihat lampiran Appendix 9.2 tabel lengkap bagi terdakwa dan tuduhan, temuan dan hukuman.

[25] KUHP Indonesia, pasal 338 dan 53.

[26] KUHP Indonesia, pasal 338 dan 53.

[27] KUHP Timor Leste, pasal 211(3).

[28] KUHP Indonesia, pasal 406.

[29] Para terpidana yang bersama dengan Gastão Salsinha pada saat melakukan serangan terhadap kendaraan Perdana Menteri di Balibar adalah: Avelino da Costa, Bernardo da Costa, Alexandre de Araújo, Januario Babo, Raimundo Maia Barreto, Julio Soares Guterres, Gaspar Lopes, Jose Agapito Madeira, Julião Antonio Soares, Quintino Espírito Santo, Adolfo da Silva, Jose da Costa Ventura dan Francisco Ximenes Alves.

[30] Domingos Amaral, Gilson José Antonio da Silva, Paulo Neno Leos, Marcelo Caetano, Joanino Maria Guterres, Gilberto Suni Mota, Egídio Lay Santo Ximenes, Ismael Sansão Moniz Soares dan Caetano dos Santos Ximenes.

[31] KUHP Indonesia, pasal 104.

[32] Pasal 338 dan 53 dari KUHP Indonesia.

[33] KUHP Timor Leste, pasal 211(3).

5.5 Banding (Peninjauan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama)

Baik kejaksaan dan terdakwa melakukan banding terhadap elemen dari putusan tersebut. Pengadilan Tinggi meninjau putusan tersebut dan memberikan putusan akhir mereka, menegaskan putusan dan dakwaan Pengadilan Distrik Dili, pada tanggal 14 Juni 2010.[34]

Pada tanggal 20 Agustus 2010, President Horta memberikan pengampunan kepada 23 orang yang didakwa dalam persidangan 11 Februari.[35] Dekrit Presiden No. 31/2010 juga memberikan pengampunan kepada tiga orang terdakwa yang telah dipenjara karena melakukan pembunuhan terhadap delapan orang anggota Polisi, yang mana berkaitan dengan krisis 2006.

---

[34] Kejaskaan memberikan tanggapan kepada pengacara terdakwa dan tuntutan tak terduga yang berasal dari pengacara Angelita Pires. Terdakwa melakukan bading atas persoalan seputar kompetensi Pengadilan Distrik Dili, membatalkan surat perintah pengadilan, foto Reinado dan Exposto yang menunjukkan mereka dieksekusi, dan pemeriksaan dan menghadirkan senjata terdakwa pada persidangan pertama. Pengadilan menolak semua inti dari banding tersebut.

[35] Tidak jelas mengapa Francisco Ximenes Alves tidak diberikan pengampunan bersama dengan kelompok yang berdasa dibawah komando Salsinha yang telah melakukan penyerangan terhadap konvoi Perdana Menteri. JSMP yakin bahwa hal barangkali Ximenes Alves, tidak sama seperti terdakwa lain yang menjalani penahanan sementara, membuatnya tidak memenuhi syarat untuk diberikan pengampunan pada tanggal 20 Agustus 2010. Contoh ini selanjutnya menekankan pemberian pengampunan secara sembarangan, dan pengunaannya seringkali berlawanan dengan kepentingan keadilan.

6. Analisis Persidangan: penyebab keprihatinan dan implikasi terhadap sistem peradilan Timor Leste

Bagian ini menjelaskan masalah-masalah yang berdampak pada persidangan 11 Februari dan apa artinya bagi sistem peradilan Timor Leste. Banyak persoalan yang muncul saat dilaksanakan persidangan tersebut adalah berkaitan dengan ICCPR , Pasal 14 mengenai hak atas peradilan adil.[36] Komentar Umum 32 dari Komite Hak Asasi Manusia mengklarifikasikan dan menjelaskan berbagai macam elemen dari peraturan ini, dan dalam hukum internasional dalam menginterpretasikan jaminan sebagaimana tertera dalam pasal 14.[37]

ICCPR, bersama dengan ICESCR dan UDHR, bentuk-bentuk yang secara global diakui sebagai hukum hak asasi manusia internasional, menetapkan kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan tertentu bagi individu. Sesuai dengan Konsitusi , kesepakatan internasional yang diratifikasi oleh Timor Leste adalah dimasukan secara langsung dalam hukum nasional.[38] Penting bahwa Timor Leste memenuhi patokan tersebut, yang mana dapat mengukur standar yang dipakai oleh sistema peradilan Timor Leste .

6.1 Sebuah penyelesaian yang tidak menyakinkan

Meskipun beberapa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, menemukan keterlibatan 24 orang dari 28 terdakwa dalam dua serangan, kurangnya bukti mengenai hal-hal yang penting. Tidak ada konfirmasi mengenai siapa yang menembak Presiden Horta, meskipun ada argumen jaksa bahwa Marcelo Caetano merupakan pelakunya. Hal ini sebabkan senjata yang digunakan untuk menembakan peluru tersebut tidak pernah diserahkan kepada pengadilan. Ada juga ketidakpastian yang siknifikan mengenai bagaimana Reinado dan Exposto terbunuh, melihat kesaksian Lino Marçal bertentangan dengan pembuktian balistik. Bukti balistik sendiri meragukan karena senjata yang digunakan untuk menembak dengan dua peluru yang berbeda – tak satu pun sesuai dengan standart senjata F-FDTL – tidak pernah diketahui. Dan tidak pernah diserahkan pada ahli balistik untuk diuji oleh F-FDTL, seperti yang diminta.

JSMP yakin bahwa ada cukup waktu untuk mengidentifikasi pelaku utama yang menembak Presiden dan siapa yang membunuh Renado dan Exposto. Putusan pengadilan meninggalkan banyak

---

[36] Dicatat bahwa setelah dimulainya persidangan atas kasus 11 Februari 2008 pada tahun 2009, JSMP mempulikasikan sebuah Update Keadilan menjelaskan fakt-fakta kunci dari kasus tersebut, dan elemen-elemen dasar dari hak-hak atas peradilan adil. Liha "Kazu '11 De Fevereriru 2008' dan prinsip peradilan yang adil" (Agustus 2009), tersedia dalam bahasa Tetum dan Indonesia pada Situs JSMP http://jsmp.minihub.org pada "Publications".

[37] UN HRC, "komentar umum 32 – Pasal 14: Hak atas kesamaan di muka penagdilan dan hak atas peardilan adil", Dok UN CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, mengantikan Komentar Umum 13 pada pasal yang sama.

[38] Timor Leste menandatangani ICCPR pada 18 September 2003.

pertanyaan yang belum terjawab bagi keluarga dan korban, dan untuk lebih luarnya bagi masyrakat Timor Leste.

JSMP berpendapat bahwa, mengingat inkonsistensi bukti yang diajukan, diragukan bahwa pengadilan memiliki bukti yang cukup untuk menghukum para terdakwa dari setiap kejahatan yang dituduhkan pada mereka. Dimata banyak orang, termasuk JSMP, semua keyakinan tersebut boleh dikatakan tidak adil karena sangat minim bukti terpercaya yang disampaikan kepada pengadilan. Dengan melihat pada dampak luas dari krisis 2006 terhadap Negara, penting bahwa kasus yang berkaitan dengan krisis dapat diselesaikan dengan cara yang memuaskan. Kasus 11 Februari yang melibatkan serangan oleh sekelompok orang yang awalnya mencari keadilan atas keluhan mereka terhadap status mereka, tetapi ketika tuntutan tersebut tidak ditanggapi maka orang-orang tersebut melakukan pembalasan dengan mencoba membunuh Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste. Hal ini menekankan bahwa sebuah peradilan yang kuat sangat penting.

6.2 Kurangnya sumber daya dari kejaksaan

Investigasi dan persidangan kasus ini berlarut-larut. Kejaksaan membutuhkan waktu untuk mengindentifikasi semua terdakwa, juga jumlah saksi yang begitu banyak. Proses investigasi tidak memuaskan yang mana tidak dilakukan secara mendalam, kurangnya fasilitas yang sesuai dan keterbatasan sumber daya manusia yang disediakan kepada kejaksaan mempersulit dalam mengumpulkan butki-bukti yang diperlukan. Juga tidak ada kordinasi yang memadai antara PNTL dan kejaksaan untuk menjamin bahwa bukti tersebut dapat secara tepat dan efisien teridenifikasi dan dikumpulkan. Ada selang waktu delapan belas hari yang mengemparkan antara kejadian 11 Februari dan pemeriksaan tempat kejadian perkara untuk menemukan peluru.[39]

Sejumlah tuduhan yang ditetapkan juga membingungan; mesikpun para terdakwa yang dibebaskan mendapatkan sejumlah tuduhan. Sementara JSMP mengakui bahwa kejahatan atau tindak pidana tersebut harus dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan dan kejaksaan tidak selalu membuktikan kejahatan yang dituduhkan, JSMP prihatin bahwa dalam kasus ini kejaksaan memberikan dakwaan dengan bukti yang kurang atau bahkan tidak ada bukti untuk memperkuat tuduhannya – hal ini benar khususnya tuduhan terhadap Pires.[40]

Hanya satu orang jaksa yang ditugaskan untuk kasus ini. Kemungkinan Kejaksaan memilih jaksa internasional, Felismino Cardoso, karena jaksa nasional mendapatkan tekanan politik dan faktor keamanan. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan sifat kejahatan yang berat dan umum, JSMP

---

[39] Lihat "Investigasaun Ekipa Forensic Hetan Inbolku 91 Iha Residensia PM", *Timor Post*, 29 Februari 2008, dan Adam Gartrell, "Pires dibebasakan tetapi banyak pernyataan yang tak terjawab – (Pires freed but many questions remain unanswered)", *AAP News*, 25 Maret 2005.

[40] Lihat lampiran 9.2.

yakin kejaksaan harus menugaskan jaksa yang lebih banyak – termasuk jaksa nasional – dan sumber daya yang lebih banyak untuk kasus tersebut.

6.3 Terdakwa kurang mengakses informasi

Pasal 14(3) mengatakan bahwa seseorang:

> (b) untuk diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pencara yang dpilihnya sendiri.

Pemantauan JSMP menemukan pengacara tidak diberikan waktu yang cukup untuk menguji tuduhan dan harus menangganinya dengan fasilitas yang terbatas. Hal ini khususnya pengacara Australia Jon Tippett, yang membutuhkan bukti-bukti yang harus diterjemahkan kedalam Inggris.

Terdakwa dan pembelanya tidak mengakses dokumen yang ada;[41] mereka menemukan bahwa dokumen tidak dapat diakses secara terbuka, jadi mereka tidak menerima beberapa dokumen yang mereka minta.[42] Salah satu contoh adalah bukti tertulis dari Presiden dan Perdana Menteri – dua orang saksi kunci dalam kasus – hanya diberikan pada tanggal 11 Februari 2010, baru beberapa saat hari tuntutan akhir dibacakan, dan hanya tiga minggu sebelum putusan akhir diberikan oleh pengdilan.

Ketika hal ini terjadi berarti bahwa hak-hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang cukup dan fasilitas yang memadai telah dilanggar, yang mana menciptakan sebuah persepsi di mata umum dan masyarakat bahwa persidangan terhadap kasus ini tidak memenuhi standar hak asasi manusia internasional dan keadilan tidak ditegakkan.

Sedangkan untuk melakukan suatu assessment dari sebesar waktu yang dimiliki dan fasilitas yang memadai serta dokumen yang bersifat essential adalah bersifat subyektif dan bervariasi atara satu kasus dengan kasus yang lainnya, walaupun demikian jelas bahwa dokumen dan bukti lain harus tersedia bagi para terdakwa sehingga para terdakwa dapat mempersiapkan kasus mereka dengan baik dan memiliki kesempatan yang cukup untuk berkomunikasi dengan secara efektif dengan pengacara mereka.[43]

---

[41] Pengacara Australia Jon Tippett, yang menjadi pembela bagi terdakwa Angelita Pires, menyampaikan keprihatinan ini pada awal persidangan pada tanggal 13 Juli 2009.

[42] UNMIT, Laporan Periodik mengenai Perkembangan Hak Asasi Manusia di *Timor Leste: 1 Juli 2009-30 Juni 2010*, hal 19.

[43] Lihat General Comment 32, paragraphs 32-34.

Salah satu syarat yang tidak memuaskan berkaitan dengan pengujian balistik . Pembela mengklaim bahwa tidak semua senjata diserahkan untuk diuji, dan tidak mengikuti aturan-aturan penyimpanan. Hal ini penting karena bukti-bukti balistik penting bagi kejaksaan.[44]

6.4 Penahanan sementara dan penundaan persidangan

Dua puluh lima dari dua puluh delapan terdakwa yang ditahan sementara di penjara Becora, ketika mereka tinggal lebih dari satu tahun menunggu persidangan mereka. Pemantauan UNMIT mengatakan bahwa ada kemungkinan paling tidak dua orang dari diantara mereka yang ditahan selama dua minggu sebelum dihadapkan kepada hakim, yang merupakan pelanggaran dari KUHAP.[45] Mereka tetap di tahanan selama persidangan, dan tidak dibebaskan sampai 27 Agustus 2010, seminggu setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden mengenai pemberian bebas murni.

JSMP berpendapat bahwa meskipun kasus ini sangatlah kompleks, waktu yang dibutuhkan untuk mengadili kasus 11 Februari 2008 dan sampai pada putusan pada tanggal 3 Maret 2010 adalah tidak memerlukan waktu yang panjang. Hal ini sebagian disebabkan oleh pihak kejaksaan yang tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk kasus ini dan akibatnya mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti. Hal ini juga disebabkan oleh karena pengadilan tidak mengatur jadwal persidangan secara efektif, penjadwalan untuk persidangan tidak bisa dijalankan karena liburan pengadilan dan secara teratur akhirnya ditangguhkan sidangnya karena dengan alasan yang tidak jelas.

Harus melihat perpanjangan penahanan yang dijamin dalam pasal 14(3)(c) dari ICCPR, yang mana seseorang dapat “disidangkan tanpa penundaan”. Penundaan meninggalkan ketidakpastian akan penahanan terdakwa, dan juga merupakan perampasan hak atas kebebasan.[46]

6.5 Keamanan tidak memadai untuk pengujung sidang

Karena sifat kasus yang berprofil tinggi, maka adanya tingkat partisipasi yang tinggi dari publik. JSMP mengamati kasus ini secara dekat dan melihat bahwa meskipun keterlibatan masyarakat dengan antusias, termasuk warga Negara biasa, pendukung dan internasional, tidak ada pengamanan yang disediakan kepada pengacara dan saksi yang dipanggil oleh pengadilan. Terdakwa dengan simpatisan dan pendukung terus menerus menunjukkan ketidak puasan mereka selama persidangan

---

[44] UNMIT, Laporan Periodik mengenai Hak Asasi Manusia, hal 19.

[45] *Ibid.*

[46] Komentar umum 32, par 35.

dan hal ini akan dapat menciptakan masalah, apalagi kasus ini menjadi kepentingan nasional, dapat berpotensi untuk terjadinya krisis baru.

Meskipun baik PNTL dan UNPOL hadir untuk mengamankan Pengadilan Distrik Dili pada saat persidangan, karena sensitivitas persidangan atas kasus tersebut, maka diperlukan perlindungan untuk saksi dan pengacara agar dapat menjamin pihak-pihak tersebut dapat berargumen atas kasus mereka tanpa ada rasa takut. Pencarian kebenaran akan terhambat jika tanpa ada pengamanan.

Hal ini persoalan khusus karena kunci saksi anggota F-FDTL yang hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian dengan pakaian seragam dan senjata yang lengkap. Dalam pemantauan kami terhadap persidangan, JSMP secara reguler melihat bahwa baik saksi dan pengacara terintimidasi dengan kehadiran anggota F-FDTL tersebut.

Pada hari-hari dimana anggota F-FDTL tidak hadir, para saksi memberikan keterangan dengan lebih jujur dan meyakinkan. Pengacara juga merasa lebih aman mewakili klien mereka pada hari-hari tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ada pengamanan para saksi dan pengacara maka kebenaran adalah merupakan sesuatu yang dikompromikan.

Undang-udang perlindungan saksi[47] telah diberlakukan sejak tahun 2009, tetapi tidak ada sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan undang-undang ini. Hal ini problematik karena saksi dalam kasus 11 Februari sudah seharusnya dijamin oleh undang-undang untuk melindunggi mereka, jika mereka meras terancam atau tidak aman untuk memberikan kesaksian dalam persidangan yang begitu sensitif.

6.6 Masalah-masalah keterangan saksi

JSMP telah menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilihan saksi, kesaksian mereka, dan banyak dari mereka yang tidak hadir di muka pengadilan pada saat dipanggil.

Sulit bagi kejaksaan untuk mengidentifikasi saksi dalam kasus ini, dan tidak dapat mengunakan bukti melalui pengunaan telepon untuk keuntungan yang maksimal karena kurangnya fasilitas. JSMP mendapatkan daftar terdakwa, dimana sekitar 120 orang yang dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Akan tetapi beberapa dari mereka tidak hadir di pengadilan karena ketika surat panggilan dikeluarkan, pengadilan tidak mengetahui alamat mereka dan semenatara yang lain tidak hadir dengan alasan bahwa mereka memiliki kekebalan untuk memberikan kesaksian secara langsung kepada pengadilan karena mereka sedang menjalankan tugas-tugas Negara.[48] Banyak saksi

---

[47] Undang-Undang No. 02/2009 menegani Perlidungan Saksi, tersedia dalam bahasa Inggris pada Situs JSMP http://www.jsmp.minihub.org, pada "Resources". Undang-undang ini dirancang mempertimbangkan saksi kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi peraturan tersebut dapat diterapkan kepada setiap saksi dalam proses hukum.

[48] Lihat bagian 6.6.2 di bawah ini.

yang tinggal di tempat yang jauh dari pengadilan dan beberapa saksi internasional telah kembali ke Negara asalnya atau telah dikirim ke misi PBB lain di luar Timor Leste.[49]

Pada beberapa kesempatan, kejaksaan memanggil saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Selama tingkat persidangan pemeriksaan, saksi lebih banyak member pernyataan yang membinggungkan. Misalnya, banyak dari mereka yang diberitahu atau dipanggil tidak memiliki informasi tangan pertama terhadap kejadian tersebut – ketika diminta untuk menjelaskan apa yang mereka tahu mengenai kejadian tersebut, mereka lalu menjawab bahwa mereka hanya mendengar dari orang lain.[50] Berdasarkan KUHAP Timor Leste, bukti tangan kedua dapat diterima dalam keadaan tertentu.[51] Akan tetapi, JSMP yakin bahwa hal ini hanya bisa terjadi jika ada hubungan dan relevansi yang jelas, dan maka bukti semacam itu kurang menjadi pertimbangan.

JSMP prihatin bahwa dalam konteks persidangan secara keseluruhan, percaya bahwa pengadilan harus menerima bukti semacama ini dalam situasional saja, dan bahwa bukti tersebut tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan bukti-bukti secara langsung. JSMP sangat memprihatinkan bahwa dalam konteks ini secara keseluruhan pengadilan mungkin memberikan suatu nilai yang sangat pada bukti yang bersifat secondary dan ini dapat menyembunyikan atau mengaburkan kebenaran dalam kasus ini dan mendengarkan para saksi semacam ini seharusnya tidak dilaksanakan.

6.6.1 Kesaksian Palsu

Persoalan selanjutnya berkaitan dengan munculnya bukti kesaksian yang berlawanan antara kesaksian kesaksian yang diberikan oleh saksi Francisco Lino Marçal dan laporan ahli balistik. Pengadilan menerima bukti bahwa peluru yang digunakan untuk membunuh Alfredo Reinado dan pengawalnya Leopoldino Exposto tidak ditembakan dari senjata Lino Marçal, akan tetapi peluru tersebut berasal dari senjata lain.

Hal ini menunjukkan bahwa saksi tersebut berbohong dan atas tindakannya jelas sudah harus dilakukan suatu tindakan yang pasti untuk mengadilinya atas pemberian kesaksian palsu.[52] Kenyataannya bahwa kejaksaan tidak melakukan hal tersebut yang merupakan keprihatinan luar

---

[49] Lihat Adam Gartrell, "Pires freed but many questions remain unanswered", *AAP News*, 25 March 2010, and *Text of UNMIT investigation into the shooting of Ramos-Horta* (14 September 2008). Gartrell menulis bahwa many dari mereka yang datang pertama pada tempat kejadian tidak memberikan kesaksian; sementara laporan UNMIT menunjukkan petugas UNPOL sampai di rumah Presiden sekitar sepuluh menit setelah menerima telpon dari orang yang tak dikenal. Kelihatannya petuags tersebut tidak lagi berada di Timor Leste pada saat persidangan, dan oleh karenanya tidak dapat memberikan kesaksian di pengadilan. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan jumlah saksi yang disidangkan dalam kasus ini yang tidak memiliki informasi dari tangan pertama atas kejadian tersebut, akan lebih berguna mencoba memperoleh pernyataan tertulis dari staf UNPOL yang datang ke tempat kejadian.

[50] Merujuk pada perkebamgan persidangan 28 Oktober ; 11, 19, dan 24 November; 1, 11, dan 15 December; dan 12 Januari 2009, dalam lampiran 9.1.

[51] KUHAP Timor Leste, pasal 120.

[52] Pasal 278 dan 279 KUHP Timor Leste mengenai sumpah palsu dan kesaksian palsu.

biasa, baik terhadap integritas pengadilan untuk memaksakan akan kesaksian kebenaran, dan komitmennya untuk menuntut mereka yang tidak menghormati kewajibannya sebagai warga Negara Timor Leste.

6.6.2 Tidak adanya kesaksian dari pejabat tinggi Negara

Sebagaimana dijabarkan di atas, persidangan tersebut melibatkan ratusan saksi dan beberapa pejabat tinggi Negara yang dipanggil untuk memberikan kesaksian sebagai saksi, akan tetapi mereka tidak memberikan kesaksian langsung kepada pengadilan karena mengklaim dirinya memiliki kekebalan ketika mereka melakukan fungsinya sebagai pemimpin di Negara ini..[53] Bagi beberapa orang saksi yang memberikan keterangan, mereka harus memperoleh ijin dari Parlemen Nasional setelah siding dari komisi yang relevan. Saksi lain menolak untuk memberikan kesaksian dengan alasan bahwa mereka diperbolehkan pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk tidak memberikan keterangan yang mana berkaitan dengan kerahasiaan profesional.[54]

Pada kenyataannya, Presiden Jose Ramos-Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmão sudah seharusnya hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian karena mereka korban dalam kasus ini, akan tetapi mereka memutuskan untuk memberikan keterangan tertulis pada akhir dari persidangan dan tidak memberikan keterangan secara lisan di pengadilan. Mesikpun, keterangan tertulis adalah sangat berharga, dan sama dengan pemberian kesaksian secara lisan,[55] kenyataannya bahwa kesaksian tersebut baru saja diberikan beberapa hari sebelum tuntutan akhir, itu berarti bahwa hanya ada sedikit peluang untuk alat bukti kunci tersebut dipertimbangkan dan digunakan oleh pihak-pihak dan pengadilan. Hal ini membahayakan peradilan yang adil dan menambah wacana yang tengah beredar dalam masayarakat Timor Leste bahwa system peradilan tidak diterapkan dengan cara yang sama bagi anggota masyarakat yang lebih kuat.

Selanjutnya, Mantan Mayor Agostu "Tara" de Araújo, saat ini menjadi anggota Parlemen Nasional tidak hadir di pengadilan karena Parlemen Nasional tidak mencabut kekebalannya untuk hadir di

---

[53] Lihat pasal 16.1, Undang-undang No. 5/2004 mengenai Status Anggota Parlemen. Dicatat bahwa interpretasi dari kekebalan ini dan dengan cara yang sepantasnya dipakai masih diperdebatkan. Lihat diskusi mengenai hal ini di dalam siaran pers JSMP tertanggal 30 Oktober 2007, ketika persoalan kekebalan parlemen dalam memberikan kesaksian, juga berkaitan dengan mantan Komsaris PNTL, sekarang sebagai anggota Parlemen, Paulo Martins.

JSMP yakin bahwa kekebalan bagi bagi anggota Parlemen dalam memberikan kesaksian terhadap kasus di pengadilan tidak dapat disangka ketika tidak mengambil tindakan terhadap mereka , tetapi lebih dari itu sesuai dengan pasal 123 KUHAP, saksi diwajibkan untuk memberikan kesaksian kecuali dibebaskan. Parlemen Nasional seharusnya lebih proaktif unutk mengijinkan agar dapat memebrikan keterangan di pengadilan.

[54] Pasal 126 KUHAP bahwa : Menteri Agama atau Khatolik, pengacara, dokter, wartawan, anggota institusi dan orang lain yang dijinkan atau diperbolehkan oleh hukum untuk menyimpan kerahasiaan professional dapat menolak memberikan keterangan mengenai fakta-fakta yang diliput dengan kerahasiaan tersebut.

[55] Sebaliknya, kesaksian lisan – dan khususnya dapat melakukan pengujian silang –adalah penting bagi sistem *common law.*

pengadilan dan memberikan kesaksiannya terhadap kasus tersebut. Begitu pun Paulo Martins, ia selain tidak hadi di pengadilan, juga tidak memberikan kesaksian tertulis. Perlakuan para figur tersebut menunjukkan kurang menghormati otoritas yudisial dan proses yudisial, dan tidak dapat membantu nama baik pengadilan dalam masyarakat.

6.7 Persoalan Bahasa

Persoalan bahasa telah menjadi bahan yang terus didiskusikan secara serius dan memanas di Timor Leste. Meskipun pasal 13.1 dalam Konstitusi mengatakan bahwa bahasa resmi Timor Leste adalah bahasa Tetum dan Portugis, perdebatan mengenai bahasa terus menjadi penting.

Persoalan tersebut semakin besar ketika sistem peradilan mengunakan bahasa Portugis sebagai bahasa eksklusif resmi di pengadilan. Dengan kata lain, bahasa Portugis adalah satu-satunya cara yang resmi untuk berkomunikasi di pengadilan; ini adalah bahasa yang digunakan ketika persidangan dilakukan, dan surat pemberitahuan dan putusan diberikan[56].

Bahasa Portugis bukan saja masalah bagi mereka yang bekerja di sistem peradilan – hal ini juga mempersulit pekerjaan anggota Parlemen Nasional ketika melakukan perdebatan terhadap undang-undang yang mereka ditugaskan untuk merancang dan menganalisis.[57] Hal ini sangat problematik karena sebagian masyarakat Timor Leste tidak dapat bicara dan memahami Portugis.

Persidangan berjalan lambang karena penerjemah harus menyampaikan instruksi dan pertanyaan dari bahasa Portugis kedalam Tetum. JSMP melihat bahwa seingkali pesan yang disampaikan oleh penerjemah sangat berbeda dengan arti sebenarnya dalam Portugis. Misalnya penerjemah – kurang kosa kata hukum – berusaha dengan istilah-istilah hukum dan jadi terdakwa dan hadirin yang tidak berbicara bahasa Portugis juga binggung dan tidak memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan yang diberikan oleh hakim, jaksa dan pembela umum. Masalah ini kemudian mempersulit untuk memahami kebenaran dari apa yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2008.

---

[56] JSMP mengakui bahwa dalam kenyataannya banyak kali proses persidangan dalam bahasa Tetum karena kebanyakan Pengacara/Hakim Nasional dari Timor Leste tidak bisa berbahasa Portugues.

[57] Lihat Siaran Pers JSMP "Pengunaan Bahasa Portugis mempersulit beberapa anggota Parlemen dalam perdebatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Mei 2010), tersedia dalam Bahasa Inggris dan Tetum di Situs JSMP http://www.jsmp.minihub.org pada "Publications".

6.7.1 Penerjemah

Penerjemah dalam persidangan meringkas keterangan saksi, ketimbang melakukan penerjemahan kata demi kata. Persoalan lain adalah salah seorang penerjemah melakukan penerjemahan sepanjang hari tanpa ada pergantian.[58]

Struktur pengadilan, yang menempatkan penerjemah untuk jaksa, di belakang jaksa dapat memberikan kesan berat sebelah. Penerjemah seringkali menerjemahkan dengan suara yang tidak jelas dan hanya diarahkan kepada jaksa tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengacara, terdakwa dan saksi. Tindakan semacam itu menghambat persidangan yang cepat dan cara-cara yang kredibel.

Persoalan penerjemahan selanjutnya yang muncul berkaitan dengan pengacara Pires, Jon Tippett. Karena ia tidak dapat berbicara dengan baik bahasa Portugis maupun Tetum, ia mengandalkan penerjemah dari Pemerintah Australia untuk membantu dia dalam persidangan, yang mana menambah kompleksitas terhadap proses tersebut.

6.7.2 Bahasa di pengadilan dan hukum hak asasi manusia internasional

Pasal 14(3)(f) dari ICCPR mengatakan bahwa seorang terdakwa berhak atas bantuan penerjemah yang gratis jika ia tidak dapat memahami atau berbicara bahasa yang digunakan di pengadilan. Komentar Umum 32 mengulanggi jaminan ini, ditambahkan dengan hasil proses yang independen, dan dapat diterapkan baik untuk orang asing maupun orang lokal yang tidak dapat memahami bahasa pengadilan.[59]

Hal ini hak dasar bagi terdakwa dalam kasus yang disidangkan oleh pengadilan, untuk menjamin bahwa kurangnya pemahaman bahasa yang digunakan di pengadilan, atau sulit dalam memahami, bukan menjadi halangan yang berdampak bagi pembelaan seseorang. Persoalan ini tidak hanya tertera dalam pasal 14, tetapi juga dalam pasal 26:

> Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini, hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.[60]

---

[58] Lihat juga UNMIT, Laporan periodic mengenai hak asasi manusia , hal 19.

[59] Lihat par 40.

[60] Emphasis added.

Ketika bahasa menjadi sebuah halangan dapat berpotensi menjadi sumber diskriminasi. Oleh karena itu, dalam kasus 11 Februari, keterbatasan dan kualitas penerjemah yang tersedia memunculkan pertanyaan atas ketepatan dari kesaksian dan bukti-bukti lain, menghambat transparansi proses dan menunjukkan bahwa tidak ada peradilan adil bagi terdakwa sebagaimana tertuang dalam pasal 14.

6.8 Penyebaran Foto Otopsi Alfredo

Ketika persidangan masih berlangsung, salinan dari foto yang diambil pada saat dilakukannya otopsi terhadap almarhum Reinado disebarkan oleh media nasional dan internasional. Sementara kejaksaan membantah adanya foto beukuran 200 (odd) - tersebut, dan menjelaskan mengenai kegunaan di persidangan, menganggap foto tersebut "tidak resmi".[61]

Sepanjang persidangan, terdakwa Pires berjanji untuk membawa persoalan tersebut ke depan karena ia sangat berkeberatan terahdap perbuatan kejaksaan, yang berdiri disamping mereka yang melakukan otopsi terhadap mayat dan tertawa.

Ini tidak etis untuk menyebarkan foto otopsi dengan cara demikian sebab tidak menghormati dan berpotensi ofensif. Tujuan dari otopsi adalah untuk kepentingan keadilan, bukan untuk menghibur masyarakat, dan untuk alasan ini foto tersebut seharusnya tidak dipublikasikan– telebih foto tersebut bukan pada akhirnya akan diterima oleh pengadilan. Keberdaan dan penyebarannya di media dapat berdampak pada nilai yang dilampirkan pada dokumen dalam pertimbangan pengadilan terhadap semua bukti yang tersedia.

6.9 Laporan media terhadap kasus

Persidangan kasus 11 Februari 2008 diadakan secara lisan dan terbuka, sesuai dengan pasal 11 mengenai ICCPR.[62] Pemantauan yang dilakukan oleh media dan pihak-pihak lain, termasuk JSMP adalah bagian dari transparansi terhadap proses, dan otoritas pengadilan sebagai institusi yudisial. Persidangan publik adalah penting dalam kasus yang berprofil tinggi yang menarik bagi banyak orang, dan Timor Leste sebagai sebuah negara.

Akan tetapi, JSMP prihatin mengenai peliputan kasus di media, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan informasi yang salah kepada publik mengenai kenyataan yang sebenarnya. Sebagaimana dijelaskan di atas, pendekatan media berpotensi untuk membinggungkan bukti-bukti

---

[61] Lindsay Murdoch, "Call for photos at Timor 'plot' trial", *The Age*, 20 November 2009, page 16.

[62] Lihat komentar umum 32, par 28. dicatat bahwa paragraf ini juga mengatakan bahwa syarat persidangan umum tidak diterapkan untuk semua banding – sidang tertutup dilakukan untuk kasus 11 Februari 2008.

dan hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut. Wartawan memiliki kewajiban etik yang bahkan lebih penting dalam persidangan pidana berat. Pasal 14 mengatakan bahwa terdakwa harus tetap dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya di pengadilan. Komentar atas kemungkinan pemberian pengampunan kepada pemberontak, misalnya, menyarankan bahwa tidak ada pertanyaan mengenai apakah mereka melakukan kejahatan atau tidak, dan selanjutnya persidangan semata-semata hanya sebuah formalitas yang menunggu keputusan dari presiden untuk membebaskan mereka.

Pada tanggal 3 Maret 2009, sebelum membuka persidangan dan sementara investigasi masih berlanjut, lalu Jaksa Agung Longuinhos Monteiro[63] melakukan sebuah konferensi pers mengkonfirmasikan bahwa kejaksaan telah siap untuk memulai proses terhadap kasus tersebut. Informasi yang ia berikan dilaporkan di surat khabar *Suara Timor Lorosa'e* yang mengindikasikan bahwa insiden 11 Februari merupakan akibat dari konspirasi karena keterlibatan Pires.[64]

Monteiro kemudian dikutip menyatakan bahwa bukti balistik menunjukkan bahwa Marcelo Caetano yang menembak Presiden, yang mana pengadilan kemudian menemukan bukti-bukti yang diperlukan tidak dibuktikan.[65] Juga berkaitan dengan bukti balistik, investigasi AFP menemukan Reinado dan Exposto ditembak pada jarak dekat (dan bukan dari jarak jauh, sebagaimana dijelaskan oleh pengawal Lino Marçal) telah membuat media mengambarkan kematian mereka adalah "eksekusi". Media internasional melihat kasus tersebut cenderung menarik perhatian pada teori konspirasi mengenai apakah Reinado dan anak buahnya sudah diatur. Laporan Australia menfokuskan pada keterlibatan salah satu tertuduh, Angelita Pires, *running headlines* ,mengambarkannya sebagai "Kekasih Reinado".[66]

Lagi pula, dalam dua minggu dari kejadian, sebelum semua militer pemberontak telah menyerahkan diri kepada otoritas, kemungkinan –memang kemungkinan benar – pengampunan presidensial yang diberikan kepada mereka sudah dimasukan dalam surat khabar Timor Leste.[67]

---

[63] Ia diganti oleh Ana Pessoa pada bulan yang sama, ditengah tuduhan korupsi dan kritikan substansial atas bias politiknya. Kantor kejaksaan kemudian direstrukturisasi, tetapi kurangnya kemandirian politik masih terasa, kalau tidak salah, karena peranan Pessoa sebelumnya sebagai Menteri Administrasi Negara di bawah pemerintahan FRETILIN.

[64] "Kasus 11 Fevereiro Akibat dari konspirasi (Kasus 11 Februari merupakan hasil dari konspirasi)", *Suara Timor Lorosa'e*, 3 March 2009.

[65] Lihat poin 19, 20 dan 21 dari Bagian C putusan pengadilan distrik Dili (atau bagian 2 dari putusan pengadilan tinggi) mengenai fakta-fakta yang terbukti.

[66] Dicatat bahwa laporan surat khabar merujuk pada Pires sebagai "Pengacara Reinado's ", dan tidak memberikan perhatian atas keterlibatannya dalam persidangan.

[67] "Vicente Guterres: Salsinha Rende, PN Sei Fo Amnestia", *Diario Nasional*, 22 Februari 2008, hal 1, 11. This Artike ini juga menjelaskan kemungkinan amnesty parlementer kepada pelaku 2006 .

6.10 Komentar mengenai kasus oleh pejabat publik

Mesikpun pejabat Negara berkomitmen untuk mendukung penuh persidangan sampai akhir, JSMP prihatin bahwa pernyataan publik tertentu dikeluarkan ketika persidangan masih berlangsung adalah tidak pantas dan mencernminkan komitmen tersebut

Contohnya adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Ramos-Horta mengenai pemberian pengampunan bagi terdakwa.[68] Persidangan belum sampai padatahap akhir dan bukti-bukti masih sedang dikumpulkan dari korban ketika dikeluarkannya pernyataan tersebut. Komentar tersebut membahayakan kemandirian dan integritas proses yudisial. Komentar-komentar tersebut berdampak negatif terhadap actor peradilan dengan tidak mendorong mereka untuk mencari kebenaran – bisa menguranggi motivasi pengacara dan hakim untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran berat, jika mereka tahu setelah mereka melakukan tugas-tugas mereka secara tekun, usaha-usaha mereka dapat diperlemah oleh Presiden dengan melaksanakan hak prerogtaifnya untuk memberikan pengampunan.[69]

Ketika persidangan masih berlangusng, Presiden Horta juga memberikan komentar negative mengenai Terdakwa Pires kepada media cetak dan televisi Australia, mengambarkannya sebagai:

> Seorang individu manipulative; elemen negative terburuk dalam semua proses … Saya tidak mengatakan bahwa ia secara langsung terlibat atau merencanakan pembunuhan terhadap saya, atau ke rumah saya. Tetapi ia selalu menjadi tantanggan, selalu melemahkan usaha-usaha perdamaian, selalu meracuni pikiran Alfredo. Jadi itulah masalahnya. Bukan dia secara materiil terlibat... dan ia tidak bersalah, saya berharap ia dibebaskan dan menjalani kehidupannya.[70]

Kegagalan pejabat Negara untuk tampil dan memberikan bukti secara lisan, juga komentar mereka terhadap persidangan ketika masih dalam proses yang menuntun ke sebuah situasi dimana masayarakat mencurigai bahwa persidangan tersebut hanya formalitas belaka, dan bukan merupakan usaha sungguh-sungguh untuk menentukan apa sebenarnya yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2008. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi penyelesaian tegangan 2006.

---

[68] Lihat, misalnya, "Ramos-Horta menyambut baik persidangan atas percobaan pembunuhan, , mulls pardon", *AFP*, 5 Maret 2009.

[69] Pasal 85.1 Konstitusi memberikan hal tertsebut memberikan hak prerogatif kepada Presiden sebagai Kepala Negara.

[70] Lihat Adam Gartrell, "Pires dibebaskan tetapi menyisahkan banyak pertanyaan mengenai pembunuhan - Pires Freed But Many Questions Remain About Kill Plot", *Australian Associated Press*, 5 March 2010, dan laporan televisi "Warga Negara Australia terjebak dalam hukum yang terlantar - Australian citizen trapped in legal limbo", *The 7.30 Report*, 18 Februari 2009, yang mana termasuk sebuah kliping mengenai Jose Ramos-Horta pada laporan *7.30 pada tanggal* 19 April 2008.

6.11 Pemberian pengampunan kepada terpidana[71]

Kasus 11 Februari 2008 bukanlah satu-satunya kasus yang diberikan pengampunan. Meskipun, hal ini merupakan hak prerogatif Presiden sesuai dengan pasal 85(i) dari Konstitusi, JSMP yakin bahwa pratek-praktek semacam itu – khususnya jika menjadi kebiasaan – akan berdampak negatif di masa mendatang sebab akan merendahkan kewenangan pengadilan Timor Leste dengan menyerahkan keadilan ke tangan Presiden. Intervensi tersebut memperlemah doktrin pemisahan kewenangan, tertuang dalam pasal 69 dari Konstitusi.

Ketika pengampunan diberikan secara bebas, itu berarti putusan pengadilan tidak lagi definitive. Hal tersebut dapat menimbulkan budaya kekebalan yang berdampak pada aktor peradilan seperti polisi, jaksa, pembela umum dan hakim. Situasi tersebut akan merusak sistem peradilan dan usaha-usaha apa saja yang sedang dilakukan untuk menanggani krisis 2006.

[71] Untuk analisis lebih lengkap dalam pemberian pengampunan di Timor Leste, lihat laporan JSMP "Kewenangan Presiden untuk memberikan pengampunan: Hak-Hak Prerogatif versus Kredibilitas istem Peradilan" (Agustus 2010), ada di seitus JSMP http://www.jsmp.minihub.org pada "Publications".

7. Rekomendasi

Berdasarkan pemantauan dan analisis persidangan, dan persoalan-persoalan yang di bagian 6, JSMP memberikan beberapa rekomendasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat efisiensi, efikas, dan kesamaan dalam sistem peardilan.

1. Hakim dan pengacara harus terus diberikan pelatihan yang efektif sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana menganalisis semua hukum yang berlaku di Timor Leste, dengan hukum internasional lain yang dapat dijadikan referensi penting. Pemahaman terhadap bagaimana menghormati nilai-nilai hak asasi manusia juga harus ditingkatkan.

2. Kantor Kejaksaan dan Pembela Umum dapat menugaskan pengacara nasional untuk menanggani kasus seperti persidangan 11 Februari 2008. Meksipun masih diperlukan pengacara internasional, mereka tidak harus menanggani kasus secara langsung dan hanya bertindak sebagai penasehat bagi pengacara Timor.

3. Kejaksaan harus mempertimbangkan dengan seksama akan berat dan sulitnya sebuah kasus, dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Harus menugaskan lebih banyak jaksa untuk kasus besar, seperti kasus 11 Februari 2008.

4. Harus merancang sebuah strategi untuk meningkatkan kordinasi antara Kejaskaan dan PNTL dalam investigasi criminal, menjamin untuk melindunggi bukti-bukti penting dari tempat kejadian, dan pengunaan waktu dan sumber daya yang efisien.

5. Harus merancang dan mengimplementasikan sebuah petunjuk yang menentukan waktu yang tepat untuk mengakses dokumen dan informasi lain untuk menjamin bahwa pihak-pihak yang terleibat dan pengacara mereka, telebih para terdakwa dan pengacaranya mendapatkan kesempatan untuk memeriksa informasi relevan dengan waktu yang memadai agar mereka dapat siap untuk persidangan. Petunjuk tersebut harus mempertimbangkan untuk menerjemahkan dokumen.

6. Hakim harus memainkan peranan yang lebih aktif dalam mengawasi bukti-bukti yang diberikan. Mereka harus membatasi pemberian bukti yang tidak relevan oleh para pihak untuk menjamin tidak menghabiskan waktu untuk informasi yang tidak berguna

7. Diberikan sumber daya yang lebih banyak untuk mengimplementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi, untuk menjamin bahwa bukti penting dan kesaksian tersebut tidak hilang atau dirusaki oleh saksi kunci karena takut memberikan kesaksian di pengadilan.

8. Sumber daya harus disediakan bagi keamanan saksi, dan juga aktor pengadilan seperti hakim, pengacara dan terdakwa, dalam kasus-kasus sensitive – baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

9. Penahanan sementara harus dilakukan dan hanya untuk waktu yang sesingkat mungkin, karena masih merupakan bentuk penahanan tanpa persidangan. JSMP mengakui bahwa dalam kasus 11 Februari, penanhanan sementara adalah tepat, dengan melihat pemberontak F-FDTL, khususnya mereka yang bersama dengan Reinado yang melarikan diri dari penjara Becora yang membahayakan.

10. Harus dilakukan sebuah pendekatan pro aktif terhadap kekebalan anggota parlemen untuk proses pengadilan. Berdasarkan pasal 16.1 dari Peraturan No. 5/2004 mengenai Status Anggota Parlemen, Parlemen Nasional harus memberikan ijin kepada anggota untuk memberikan kesaksian dalam proses yudisial setelah sidang yang dilakukan oleh komite yang berkompeten, memberikan ijin kepada anggota untuk memberikan kesaksian setiap saat namun kondsi yang luar biasa. JSMP mempertimbangkan bahwa kekebalan tersebut bermaksud untuk mencegah pejabat publik untuk tidak dihalang tugas-tugasnya dan terlibat dalam persoalan yang tidak relevan; akan tetapi kasus 11 Februari merupakan persoalan kepentingan nasional, yang mana beberapa pejabat tinggi secara langsung sebagai korban atau saksi. Pengadilan juga seharusnya tidak melakukan intepretasi sempit dari pasal 126 KUHP yang berkaitan dengan kerahasiaan professional, untuk menjamin bahwa perlindungan tersebut hanya diperlukan dalam kasus-kasus dimana kerahasiaan tersebut benar-benar penting.

11. Putusan pengadilan harus diterjemahkan dari Bahasa Portugis ke dalam Tetum dan dipublikasi pada saat yang sama, untuk meningkatkan pengujian akan proses yudisial dan mencegah adanya kesalahan informasi.

12. Harus dilakukan upaya-upaya yang lebih banyak untuk mempekerjakan dan melatih penerjemah yang lebih banyak, yang juga diberikan pelatihan tambahan mengenai istilah-istilah hukum, membuat proses pengadilan lebih lancer dan terjemahan yang lebih akurat.

13. Posisi penerjemah dalam ruang sidang harus terlihat imparsial – keadilan harus ditegakan. Pada saat ini, penerjemah duduk di samping kejaksaan; JSMP merekomendasikan bahwa penerjemah dapat dijinkan untuk berpindah ketika melakukan terjemahan penting bagi pembela; atau harus ada dua orang penerjemah, yang masing-masing duduk disamping ruang sidang .

14. Pasal 85(i) dari Konstitusi mengatakan Presiden dapat memberikan pengampunan dan menguranggi hukuman, tetapi hanya setelah konsultasi dengan pemerintah. Prose spemberian pengampunan atau pengurangan hukuman, harus dilakukan dengan cara-cara yang transparan dan hanya dalam kondisi yang eksepsional. Berkaitan dengan kasus 11 Februari 2008, Presiden hanya mengatakan, tanpa memberikan penjelasan lebih jauh bahwa terdakwa yang diberi pengampunan “juga merupakan korban”, ia seharusnya memberikan definisi yang jelas terhadap fakta-fakta yang dipertimbangkan sebelum memberikan pengampunan. Lagi pula, harus ada proses untuk menerima keluhan dari pihak manapun yang merasa secara langsung

atau tidak langsung terkena dampak dari pengampunan presidensial ini untuk pertanggungjawaban maksimal.

15. Media harus tunduk pada kewajiban etik tertentu ketika melaporkan persidangan pidana berat. Lebih penting, mereka harus menghormati praduga tak bersalah terhadap terdakwa. Media harus tidak mempublikasikan informasi-informasi yang kurang baik atau informasi atas bukti-bukti ketika persidangan masih berjalan.

16. Pejabat tinggi tidak seharusnya membuat suatu pernyataan mengenai suatu persidangan sebelum proses tersebut berakhir. Komentar dari para petinggi Negara semacam ini yang mana dalam posisi autoritas dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi pendapat masyarakat dan kemungkinan juga untuk putusan dari pengadilan dan semua alasan yang seharusnya ada independensinya.

8. Kesimpulan

Kasus 11 Februari 2008 adalah penting karena kaitannya dengan kerusuhan 2006 di Timor Leste, dan karena melibatkan percobaan pembunuhan terhadap pejabat kunci Negara. Kejadian yang bersifat publik dan dilanjutkan dengan persidangan menjadi penting karena proses dan hasil dari persidangan adalah untuk memberikan keadilan bagi semua orang yang terlibat.

Sementara JSMP menyambut baik komitmen dan kontribusi dari Pengadilan Distrik Dili dan berbagai macam pihak dalam kasus ini – termasuk pengacara, saksi, PNTL dan GNR Portugal, F-FDTL dan media – Pemantauan JSMP telah menemukan beberapa penyebab keprihatinan. Catatan khusus adalah gagal untuk menentukan seiapa yang menembak Presiden Horta, Mayor Alfredo Reinado atau pengawalnya Leopoldino Exposto, atau siapa yang menembak Perdana Menteri; intervensi secara tidak langsung dari pejabat tinggi Negara; dan pelanggaran terhadap hukum internasional hak asasi manusia mengenai peradilan adil. Banyak persoalan yang ditekankan dalam laporan ini berimplikasi terhadap kasus 11 Februari 2008 sendiri, mengungkapkan kelemahan system peradilan Timor Leste yang perlu diperhatikan. Jika sistem peradilan tidak dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dalam kasus penting dan berprofil tinggi ini, maka hal ini memiliki implikasi yang lebih besar terhadap situasi dan sektor peardilan secara luas.

9. Lampiran

9.1 Kronologis Persidangan

Pemantaun pengadilan pada halaman berikut ini berdasarkan pada pemantauan JSMP terhadap persidangan.

Tanggal	Pemantauan Persidanagan
11 February 2008	Presiden Horta tertembak di rumahnya di Metiaut, Dili; Mayor Alfredo Reinado dan Pengawalnya Leopoldino Exposto terbunuh di tempat kejadian.Konvoi Perdana Menteri diserang setelah itu di Lauara.
29 April 2008	Pemberontak terakhir yang terlibat dalampenyerangan 11 Februari menyerahkan diri kepada otoritas .
Pada tahun berikutnya,	*kejakasaan mengumpulkan bukti dan memberikan dakwaan terhadap 28 orang tertuduh*
13 July 2009	Persidangan atas 11 Februari 2008 dimulai di pengadilan Distrik Dili.
	selama persidangan pertama tak satu pun terdakwa yang ingin memberikan kesaksian di pengadilan mengenai bukti-bukti yang dihadirkan oleh kejaksaan terhadap mereka. terdakwa mengunakan hak mereka untuk tetap diam dan hakim menyatakan persidangan terbuka kepada publik untuk mendengarkan keterangan saksi.
	Saksi pertama DA merupakan seorang anggota F-FDTL dan dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian yang iha tahu bahwa terdakwa Susar (Amaro da Costa) dan Ismael Sansão Moniz Soares, serta terdakwa lain, mengambil senjata Metra di depan pintu masuk kediaman Presiden ketika saksi tersebut sedang berjaga. saksi tersebut juga mengatakan bahwa ia mengenal semua terdakwa karena beberapa dari mereka sebelumnya anggota F-FDTL. akan tetapi, saksi memberitahu pengadilan ia tidak tahu siapa yang menembak Presiden.
Ada tiga minggu liburan yudisial pada bulan Agustus	
September	Pengadilan terus melndengarkan keterangan saksi.
9 September 2009	Persidangan ditunda kareba salah satu terdakwa tida hadir , dengan laasan bahwa ia tidak diberitahu .
Tiga Persidangan di bulan Oktober	
8 October 2009	pengadilan tidak dapat mendengarkan keterangan saksi karena pembela umum Andre Peixoto meminta izin untuk kembali ke negara asalanya Brazil, jadi persidangan ditunda.
14 October 2009	Pemeriksaan saksi dari dua orang saksi, keduanya adalah anggota organisasi MUNJ yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan mediasi antara kelompok pemberontak Reinado dan Salsinha dan negara.
	Saksi CP mengatakan kepada pengadilan bahwa pada tanggal 9 Februari, ia pergi ke Suai untuk mengantar Alfredo Reinado dan membawanya ke Dili untuk bertemu dengan otoritas negara di Istana pemerintah . Akan tetapi, saksi mengatakan bahwa mereka tidak dapat mewujudkan rencana mereka karena pada saat itu Angelita Pires menghentikan mereka dengan mengatakan bahwa tidak aman bagi Alfredo Reinado untuk melakukan perjalanan ke Dili. lagi pula, saksi AJ mengatakan bahwa seringkali bertemu dengan terdakwa Susar (Amaro da Costa) dan Gastão Salsinha ketika mereka masih berada di hutan. Akan tetapi, saksi mengatakan bahwa ia tidak tahu mengapa kejadian yang terjadi pada tanggal 11 Februari.

Pengadilan mendengarkan keterangan dari 52 orang saksi pada bulan November	
11 November 2009	Pengadilan mendengarkan kesaksian dari saksi ADS dan PDR. para saksi adalah pengawalnya Perdana Menteri Xanana Gusmão, yang diduga mengetahui mengenai serangan terhadap Kepala Pemerintah di Balibar. Mereka memberiakn kesaksia bahwa jendela belakang dari mobil ditembaki yang juga membocorkan roda belakang mobil yang mereka tumpanggi
16 November 2009	Pengadilan melanjutkan persidangan dengan maksud mendengarkan sidang kesaksian dari saksi yang lebih banyak. akan tetapi, penagdilan juga mendiskusikan status pengacara internasional, George Barbosa yang mengantikan pembela umum Zeni Alves Arndt untuk mewakili Angelita Pires. sebelum persidangan dimuali, kejaksaan diwakili oleh Felismino Cardoso mempertanyakan Barbosa, yang menyelesaikan pendidikan hukum di Brazil. kejaksaan meminta pengadilan untuk memberikan waktu kepada pengacara tersebut untuk membuktikan dirinya dan mengurus dokumen yang memberikan ijin kepadanya untuk berpraktek, untuk menunjukkan bahwa ia diberi otoritas dan dapat mengantikan Dr Alves Ardnt, yang mana berakhirnya kntrak dengan pemerintah Timor-Leste.
19 November 2009	Pengadilan mendengarkan kesaksian dari empat orang saksi, diantaranya DM, FA, MA dan AR. Tiga dari mereka memberitahu pengadilan bahwa mereka tidak melihat apa yang terjadi pada Perdana Menteri Xanana Gusmão in Balibar. Saksi DM memberitahu pengadilan bahwa ia mendengar tembakan tetapi ia takut dan tinggal di dalam bersama dengan anak-anaknya. tembakan tersebut di arahkan ke pengawal perdana menteri yang mengendarai mobil, yang menyebabkan mobil masuk ke dalam ravine, dan mereka berteriak meminta bantuan untuk mengambil senjata yang mereka bawa tetapi saksi takut sehingga tidak keluar .The court hears testimony from four witnesses,
24 November 2009	pengadilan mendengar kesaksian dari delapan orang saksi. saksi JB mengambil posisi yang unik dengan mengunakan haknya untuk tidak memberikan kesaksiannya dengan dasar bahwa ia seorang wartawan, dan sementara almarhum Alfredo Reinado dan kelompoknya bersembunyi di dalam hutan di Ermera, saksi ini berkali-kali bertemu dengan mereka untuk memperoleh informasi. saksi lain memberitahu pengadilan bahwa mereka tidak tahu benar mengenai kejadian dan penyerangan tersebut, dan satu orang saksi mengatakan bahwa ia hanya mendengarnya dari orang lain.

Tanggal	Pemantauan Persidangan
Pemeriksaan tempat perkara dan rekonstruksi , bukti ahli balisitik dan rekomendasi akhir dilakukan pada bulan Februari	
1 February 2010	Pengadilan melakukan pemeriksaan tempat kejadian di kediaman Presiden. pemeriksaan tersebut juga dilakukan di tempat dimana almarhum Alfredo Reinado dan Leopoldino Exposto tertembak. Polisi dan Panitera tidak mengijinkan publik untuk mengambil bagian dalam pemeriksaan tersebut dan menyuruh mereka untuk berdiri pada jarak yang layak
2 February 2010	Anggota pengadialn pergi ke Baliabar adalah kelompok yang dibawa komando Gastão Salsinha yang menyergap kendaraan Perdana Menteri Xanana Gusmão.
8 February 2010	Pengadilan mendengarkan keterangan dari ahli yang melakukan uji balisitik di laboratoriu Australia. Ahli tersebut mengatakan bahwa hasil uji balisitik menunjukkan bahwa luka yang diterita oleh Presiden bukan berasal dari tembakan senjata yang dipakai oleh terdakwa, dan peluru yang menembus almarhum Alfredo Reinado dan Leopoldino Exposto juga bukan berasalah dari senjata yang digunakan oleh F-FDTL.
11 February 2010	Pengadilan menjadwalkan untuk mendengarkan rekomendasi dakwaan akhir dalam kasus ini, akan tetapi kejaksaan menyampaikan kesaksian tertulis dari Presiden Horta dan Perdana Menteri Gusmão kepada Pengadilan, dan juga 16 February ditetapkan untuk mendengarkan rekomendasi akhir dari para pihak.
16 February 2010	Pengadilan mendengarkan rekomendasi akhir dari jaksa, yang mempertahankan tuntutan asli berdsarkan ketentuan yang tertera dalam KUHP Indonesia berikut ini, pasal 53(1), 65, 406, dan 362 dan Pasal 4.4.7 Regulasi UNTAET Regulation 2001/05. Kejaksaan hanya merubah dakwaan yang berkaitan dengan konspirasi karena kurangnya bukti. kejasakan mengatakan bahwa telah terbukti bahwa terdakwa menunjukkan niat untuk membubunh Perdana Menteri sebab mereka telah menembaki kendaraan Perdana Menteri di Balibar.
3 March 2010	Dputusan pengadilan Distrik Dili dijatuhkan.
5 March 2010	Putusan tertulis tersedia .
Banding	
14 June 2010	Putusan pengadilan tinggi dijatuhkan
20 August 2010	Presiden Horta memberikan pengampunan kepada 23 orang terpidana dalam kasus 11 Februari .
27 August 2010	23 orang terpidana yang mendekam di penjara Becora dibebaskan.

9.2 Tabel tersangka, dakwaan, temuan dan hukuman

Catatan 1. Sesuai dengan KUHP Indonesia, pemberian hukuman atas tindak pidana berlapis, masa penahanan harus disesuaikan dan dibatasi sesuai dengan pasal 65; dengan demikian, pengadilan menjumlahkan total kumulatif. Aturan tambahan berkaitan dengan percobaan dapat ditemukan pada pasal 53.

Catatan 2. Temuan Pengadilan Distrik Dili diperkuat oleh pengadilan tinggi, termasuk lamanya hukuman yang dijatuhkan.

Nama terdakwa	Putusan*	Tuduhan	Hukumyang relevan	Hukuman penjara
Gastão Salsinha	*Criminal responsibility extinguised*	Percobaan Konspirasi terhadap Presiden republik	Pasal 110, 88, dan 104 KUHP Indonesia menkriminalisasi dalam pasal 30(1) dan 118 dari KUHP Timor Leste	
	Dibebaskan	4 tuduhan mengenai percobaan pembunuhan (Johnny Barbosa, José Maria Barreto Soares, Komsan Tookokgruado, Alongkorn Kalayanasoontor)	Pasal 338 dan 53 KUHP Indonesia	
		1 satu tuduhan pengrusakan kendaraan (sebuah mobil bernomor plat 'SEC 1')	Pasal 406 KUHP Indoensia	
	Dipidana	satu tuduhan percobaan pembunuhan (terhadap Perdana Menteri Gusmao)	Pasal 338 dan 53 KUHP Indonesia	Tiann 8
		2 tuduhan percobaan pembunuhan (terhadap Bobby Agaptio Gonçalves, Adolfo Soares dos Santos)	Pasal 338 dan 53 KUHP Indonesia	Tinan 6 kada tinan
		1 tuduhan pengrusakan sebuah kendaraan (tmobil perdana menteri 'PM1')	Pasal 406 KUHP Indoensia	fulan 18
		1 tuduhan pengunaan senjata terlarang	Pasal 211(3) KUHP Timor Leste	tahun 2
	Total Kumulatif			**10 tahun delapan tahun penjara**
Amaro da Costa, Domingos do Amaral, Gilson José Antonio da Silva, Paulo Neno Leos, Marcelo Caetano, Gilberto Suni Mota, Joanino Maria Guterres, Egídio Lay de Carvalho, Ismael Sansão Moniz Soares, Caetano dos Santos Ximenes *(10 orang terdakwa)*	*Dibebaskan*	1 tuduhan atas pengrusakan kendaraan (mobil F-FDTL yang dibawa oleh Celestino Gama)	Pasal 406 KUHP Indonesia	
		1 tuduhan pencurian	Pasal 365(2)(ii) KUHP Indonesia	

Nama Terdakwa	Putusan	Tuduhan	Hukum yang relevan	Hukuman Penjara
		8 tuduhan percobaan pemmbunuhan (Celestino Gama, Isaque da Silva, Pedro Joaquim Soares, Adelino da Silva, João Soares, José Luis da Costa Pereira, Agostino de Freitas, Filomeno Ximenes)	Pasal 338 dan 53 KUHP Indonesia	
	Dipidana	Percobaan pembunuhan terhadap Presiden Republik	Pasal 104 KUHP Indonesia	12 tahun
		4 tuduhan percobaan pembunuhan (Domingos Pereira, Albino de Assis, José Pinto Freitas, Francisco Lina Marçal)	Pasal 338 dan 53 KUHP Indonesia	4 tahun untuk setiap tuduhan
		Pengunaan senjata terlarang	Pasal 211(3) KUHP Timor-Leste	2 tahun
	Total Kumulatif			**16 tahun**
Avelino da Costa, Bernardo da Costa, Alexandre de Araújo, Januário Babo, Raimundo Maia Barreto, Júlio Soares Guterres, Gaspar Lopes, José Agapito Madeira, Julião Antonio Soares, Quintino Espíritu Santo, Adolfo da Silva, José da Costa Ventura, Francisco Ximenes Alves *(13 defendants)*	*Dibebaskan*	4 tuduhan percobaan pembunuhan (Johnny Barbosa, José Maria Barreto Soares, Komsan Tookokgruado, Alongkorn Kalayanasoontor)	Pasal 338 dan 53 KUHP Indonesia	
		1 Tuduhan pengrusakan kendaraan (sebuah mobil dengan nomor plat 'SEC 1')	Article 406 of the Indonesian Criminal Code	
	Dipidana	1 tuduhan percobaan pembunuhan (terhadap Perdana Menteri Gusmao)	Pasal 338 dan 53 KUHP Indonesia	7 tahun
		2 tuduhan percobaan pembunuhan (terhadap Bobby Agaptio Gonçalves, Adolfo Soares dos Santos)	Pasal 338 dan 53 KUHP Indonesia	5 tahun untuk setiap tuduhan
		1 tuduhan pengrusakan kendaraan (mobil Perdana Menteri 'PM1')	Pasal 406 KUHP Indonesia	1 tahun
		Pengunaan senjata terlarang	Pasal 211(3) KUHP Timor Leste	2 tahun
	Total Kumulatif			**9 tahun 4 tahun**

Nama Terdakwa	Putusan*	Tuduhan	Hukum yang relevan	Hukuman Penjara
4 orang terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan				
Angelita Pires	*Dibebaskan*	Konspirasi dalam percobaan pembunuhan terhadap Presiden	Pasal 104 KUHP Indonesia	
		19 tuduhan percobaan pembunuhan	Pasal 338 dan 53 KUHP Indonesia	
		3 tuduhan pengrusakan kendaraan	Pasal 406 KUHP Indonesia	
Tito Tilman, Alfredo de Andrade, João Amaral *(3 terdakwa)*	*Dibebaskan*	7 tuduhan [percobaan pembunuhan	Pasal 338 dan 53 KUHP Indonesia	
		Pengunaan senjata api untuk menganggu ketertiban umum	Pasal 4.4.7 dari Regulasi UNTAET No. 2001/5	

9.3 Kutipan dari aturan perundang-undangan yang relevan

9.3.1 ICCPR

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajiban dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang di ambil dalam perkara pidana maupun perdata harus di ucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.
2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
   a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alas an tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
   b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
   c) Untuk di adili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
   d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membyarnya;
   e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringakannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalama kasus orang dibawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuma sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorang pun dapat di adili dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing Negara.

Pasal 15

1. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana mucul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin

perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran atau status lain.

9.3.2 Konstitusi RDTL

Pasal 67

(Badan-badan Kedaulatan)

Lembaga-lembaga kedaulatan Negara terdiri atas Presiden Republik, Parlemen Nasional,

Pemerintah dan Pengadilan

.

Pasal 118

(Yuridiksi)

1. Pengadilan adalah badan kedaulatan dengan wewenang untuk menegakkan

keadilan, atas nama rakyat.

2. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pengadilan berhak memperoleh bantuan

dari aparat pemerintah lainnya.

3. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan berada di atas putusan pihak

berwewenang apapun lainnya.

Pasal 119

(Kemandirian)

Pengadilan adalah mandiri dan hanya tunduk pada UUD dan hukum.

.

9.3.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pasal 53

1. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman jika maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak tergantung kemanuannya sendiri.

2. Maksimum hukuman utama, diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaannya.

3. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

4. Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan.

Pasal 65

1. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, amaka satu hukuman saja yang dijatuhkan.

2. Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 88[72]

"Konspirasi" ada ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan.

Pasal 104[73]

Penyerangan yang dilakukan dengan maksud hendak menghilangkan nyawa Presiden atau wakil Presiden, atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaan mereka itu, atau hendak menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah dipindana dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selam –lamanya dua puluh tahun.

---

[72] Pasal 88, 104 dan 110 tidak dipidanakan oleh pasal 3(1) dan 118 KUHP Timor Leste.

[73] Lihat catatan kaki di atas .

Pasal 110[74]

1. Mupakat jahat akan melakukan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104,106 dan 108 dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya enam tahun.

2. Pidana itu dijatuhkan juga atas orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahtan yang disebut pada pasal 104,106,107 dan 108:

   Ke-1 Mencoba membujuk orang lain supaya ia melakukan ,menyuruh melakukan atau turut melakukan kejahatan itu atau memberi bantuan atau kesempatanm ikhtiar atau ke terangan untuk kejahatan itu;

   Ke-2 Beriktiar akan mendapta atau akan mendapatkan bagi orang lain kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

   Ke-3 Menyediakan barang yang diketahuinya, bahwa barang ini guna menjalankan kejahatan itu;

   Ke-4 Menyiapkan atau mempunyai rencana untuk melakukan kejahtan itu, yang akan diberitahukan kepada orang lain;

   Ke-5 berikhtiar mencegah, menghalangi atau menggagalkan sesuatu daya-upaya pemerintah untuk mencegah atau menghentikan orang melakukan kejahatan itu.

.

Pasal 338

Barangsiapa dengan sengaja menhilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 362

Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ribu rupiah.

Pasal 365

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, desertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang,dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada

[74] Lihat catatan kaki di atas.

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.

2. Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

   Ke-2 Jika Perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

...

Pasal 406

1. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan,merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menhilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya emapt ribu lima ratus rupiah.

2. Pidana itu juga dijatuhkan kepada orang, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan,membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan hewan, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

9.3.4 Timorese Criminal Code

Artigu 3

Lei penál nia aplikasaun iha tempu

1. Ema ida labele hetan pena tanba faktu ne’ebé lei define hanesan krime iha momentu ne’ebé nia pratikafaktu ne’e kuandu lei posteriór dehan katak faktu ne’e la'ós krime ona.

Artigu 118

Kauza seluk

Responsabilidade kriminál extinge iha kazu ne’ebé lei prevee no tanba ajente mate, tanba amnistia no tanba indultu.

Artigu 211

Arma proibida

3. Ajente ne’ebé, maski laiha autorizasaun legál, detein, uza ka rai arma de fogu sei hetan pena prizaun too tinan 2 ka multa.

9.3.5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste

Pasal 358

Tanggungjawab untuk membayar biaya perkara dan procedural

1. Dimana terdakwa terbukti bersalah, penagdilan juga dapat menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara dan biaya-biaya prosedural lain jika pengadilan yakin bahwa keadaan ekonomi terdakwa memungkinkan untuk menanggung biaya tersebut.

...

9.3.6 Regulasi UNTAET No. 56 of 2001

Pasal 4

Prohibition of Unauthorised Activity

4.7 Any person who without lawful authority imports into East Timor any firearm, ammunition or explosive with the intent to disrupt public order, or who uses any firearm, ammunition or explosive in the disruption of public order is guilty of a criminal offence and shall be punished by a fine not to exceed fifty thousand U.S. dollars (USD 50,000) or a term of imprisonment not to exceed twenty years, or both.

9.3.7 Law No. 5/2004 on the Status of Members of Parliament

Article 16

Rights of Members of Parliament

1. A Member of Parliament may not serve as a jury member, witness or expert without authorisation from the National Parliament, which may or may not be granted after the Member of Parliament has been heard in that respect by the competent committee.

2. The absence of a Member of Parliament from an official act or proceeding extraneous to his or her function by reason of a meeting or task of the National Parliament shall always constitute a good excuse for the postponement of such act or proceeding.

A Member of Parliament may not invoke the excuse provided for in this previous subarticle more than once in connection with such official act or proceeding.

9.4 Bibliografi dan bacaan lanjutan

9.4.1 Instrumen Internasional

Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik terlampir pada UNGA res. 2200A (XXI), 16 Desember 1966.

Delkarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia terlampir pada UNGA res. 217A (III), 10 Desember 1948.

UN HRC, "Komentar Umum No. 32 – Article 14: Hak atas persamaan di depan pengadilan dan peradilan adil", UN Doc. CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007.

9.4.2 Instrumen Hukum Nasional Timor Leste

Konstitusi RDTL 2002 (*Konstitusi*).

KUHP Indonesia (dapat diterapkan di Timor Leste) (perubahan terakhir 1999) [Timor Leste (East Timor)], 27 Februari 1952, UNTAET Regulasi No. 56/2001, tersedia di http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ffbcee24.html (*Indonesian Criminal Code*).

Undang-Undang No. 13/2005 Yang Mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Indonesian Criminal Procedure Code*).

Undang RDTL No. 5/2004 mengenai Status Anggota Parlemen.

Undang-undang RDTL No. 2/2009 mengenai Perlindungan saksi .

Dekretu-Lei RDTL No. 19/2009 Kódigu Penál (*KUHP Timor Leste*).

RDTL Decreto do Presidente No. 30/2010.

Regulasi UNTAET No. 2001/5 mengenai senjata api, amunisi peledakdan senjata-senjata bahaya lain di Timor Leste .

9.4.3 Laporan-laporan JSMP[75]

Laporan Tematik

Timor: Legal System Faces Chaos (2003).

Tinjaun Peradilan di Timor Leste 2010 (akan diterbitkan, Februari 2011).

---

[75] Berikut adalah laporan-laporan, update keadilan dan siaran pers yang tersedia di *online* pada http://www.jsmp.minihub.org, pada "Publications".

Update Keadilan

"JSMP Response To The Report Of The UN Independent Special Commission Of Inquiry For Timor Leste" (Issue No. 14, October 2006).

"The Case of Alfredo Reinado" (Issue No. 8, covering the period of July 2006).

"Court's Decision in 11 February Case demonstrates the significance and spirit of the Timorese Judicial Institutions" (Issue No. 6, June 2010).

"New Players in Timor Leste's Justice System" (Issue No. 31, August 2006).

Siaran Pers

"Kontinuasaun Rona Depoimentus Ba Testamunha Akontesementu 11 Fevereiro Presiza Durubassa Ho Diak" (July 2009).

"Kazu '11 De Fevereriru 2008' No Prinsipiu Julgamentu Ne'ebe Justu" (August 2009).

"Tribunal Distrital Dili Kontinua Rona Testemunha Kazu Atentadu 11 Fevereiru" (September 2009).

"Assesor Militar ba Prezidente fo Depoimentu iha Julgamentu Kontinuasaun ba Kazu 11 de Fevereiru 2008" (September 2009).

"Kontroversiu Substituisaun Equipa Advogado Ba Kazu 'Atentadu 11 De Fevereiru'" (November 2009).

"Final decision issued by court in 11 February case fails to prove who shot the President of the Republic" (March 2010).

"Use of the Portuguese language makes it hard for a number of parliamentarians to debate the draft civil code" (4 June 2010).

"Competency of the President to Grant Pardons: Prerogative Right versus Credibility of the Justice System" (August 2010).

"Sistema justisa Timór Léste nafatin iha situasaun risku nia laran" (22 December 2010).

9.4.4 Atikel, laporan-laporan dan sumber lain

"AATL Ejiji Tribunal Reezame Kilat Musan Tiru Major Alfredo", *Suara Timor Lorosa'e*, 10 February 2010, 1, 15.

Adh genève (Académie de droit international humanitaire-Geneva academy of international humanitarian law and human rights), *Rule of Law in Armed Conflicts Project*, <http://www.adh-geneve.ch/RULAC/international_treaties>.

"Accused Ramos-Horta assassination plotters face court", *ABC News*, 13 July 2009.

"Advogada Angelita Hetan Kaer: Hahu Prosesu Hearing Horseik", *Timor Post*, 19 February 2008, 1, 15.

Amnesty International, "Justice in the shadow" (2009).

"Angelita Hetan Livre TIR Husi Tribunal", *Timor Post*, 20 February 2008, 1.

Asia Foundation, *Law and Justice in Timor Leste: A Survey of Citizen Awareness and Attitudes Regarding Law and Justice 2008* (2009).

"Autopsy finds Reinado may have been executed", *Reuters*, 13 August 2008.

Coelho de Morais, Abel and Firdia Lisnawati, "ONU confirma ligação de ataques a Ramos-Horta e Xanana Gusmão", *Diário de Notícias*, 21 February 2008.

Doswald-Beck, Louise, "Fair Trial, Right to, International Protection", in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* <www.mpepil.com>

Dunn, James, "East Timor: A New Dawn?" (May 2008). Available online at: www.hrca.org.au/wp-content/uploads/2008/06/a-new-dawn-james-dunn1.pdf (Accessed 1 January 2011).

"E Timor arrests Reinado 'lawyer'", *BBC News Online*, 18 February 2008.

"E Timor calls for probe into Ramos-Horta assassination plot", *ABC News*, 5 March 2008.

"E Timor denies possible execution of Reinado", *Reuters*, 18 August 2008.

"E. Timor leader defends pardon for rebels after UN criticism", *AFP*, 23 October 2010.

"E Timorese rebels deny murder bid", *BBC News Online*, 14 February 2008.

"East Timor's Post-Trauma", *ABC Radio National – Late Night Live*, 21 February 2008. Available online at http://www.abc.net.au/rn/latenightlive/stories/2008/2169293.htm (Accessed 13 December 2010).

"East Timorese sense blood in the air", *The Canberra Times*, 3 April 2010, 10.

Economist Intelligence Unit, *Timor Leste Country Report* (October 2010).

Economist Intelligence Unit, *Timor Leste Country Report* (October 2009).

Economist Intelligence Unit, *Timor Leste Country Report* (April 2008).

Everingham, Sara, "QC slams Ramos-Horta assassination case", *ABC News*, 15 February 2010.

"Felismino Cardozo: 'Asesor Alfredo Hetan TIR'", *Diario Nasional*, 19 February 2008, 1, 9.

Gartrell, Adam, "Timorese assassin plot doubt – Aussie expert testifies", *The Daily Telegraph*, 13 February 2010, 38.

Gartrell, Adam, "Asia: Pires freed but many questions remain about kill plot", *Australian Associated Press*, 5 March 2010.

"Grupu Alfredo Nain Lima Hetan Ba Justisa", *Diario Nasional*, 28 February 2008, 1, 11.

"Grupu Salsinha La Tama Lista Indultu", *Diario Nasional*, 6 May 2010.

"Horta Sisi Tusan Atu Hetan Justisa ba Atentadu 11 Fevereiru", *Tempo Semanal*, 9 February 2009.

Human Rights Watch, "Country Summary: Timor Leste" (January 2009).

"Indultu Bele Garante Hado'ok Odio no vigansa?", *Suara Timor Lorosa'e*, 22 May 2010.

International Crisis Group, *Asia Report No. 120: Resolving Timor Leste's Crisis* (10 October 2006).

International Crisis Group , *Timor Leste's displacement crisis* (31 March 2008).

International Crisis Group, *Update Briefing. Timor Leste: No Time for Complacency* (February 2009).

"JSMP Lamenta Tinan 2 Salsinha Cs Seidauk Hetan Rezultadu", *Suara Timor Lorosa'e*, 10 February 2010.

"JSMP-HAK: Indultu Fo Salsinha Bazeia ba Lei", *Suara Timor Lorosa'e*, 13 April 2010.

"Julgamento do atentado contra Ramos-Horta e Xanana na fase final", *iOnline*, 11 February 2010.

"Investigasaun Ekipa Forensic Hetan Inbolku 91 Iha Residensia PM", *Timor Post*, 29 February 2008.

"Kazu 11 Fevereiro Rezulta Husi Konspirasaun", *Suara Timor Lorosa'e*, 3 March 2009.

"Konsidera Akuzasaun MP La Forte, Defensor Husu Tribunal Liberta Arguidus", *Diario Nasional*, 12 February 2010, 1, 13.

"Kronologis Penembakan Presiden Ramos Horta", *Suara Timor Lorosa'e*, 13 February 2008, 1, 11.

"Longuinhos: 'Atu Fasilita Investigasaun' AFP-PNTL Halo Rekonstusaun Iha Laulara", *Diario Nasional*, 28 February 2008, 1, 11.

"Longuinhos: 'Identifika Ona Supeitu 18'", *Diario Nasional*, 14 February 2008, 1, 7.

Lusa, "President só terá sido atingido quando regressava a casa: Reinado morto quase uma hora antes de Ramos-Horta ser ferido", *Público*, 11 February 2008.

Ministério da Justiça, *Justice Sector Strategic Plan for Timor Leste 2011-2030* (approved 12 February 2010).

Murdoch, Lindsay, "Ramos-Horta braved rebels", *Sydney Morning Herald*, 13 February 2008.

Murdoch, Lindsay, "Ramos-Horta names gunman", *Sydney Morning Herald*, 13 March 2008.

Murdoch, Lindsay, "Dili investigator called to Canberra as evidence of execution mounts", *Sydney Morning Herald*, 4 September 2008.

Murdoch, Lindsay, "Call for photos at Timor's 'plot' trial", *The Age*, 20 November 2009, 16.

Murdoch, Lindsay, "Angelita Pires acquitted of Timorese plot to kill", *The Age*, 4 March 2010, 4.

Murdoch, Lindsay, "Timor verdicts provide more questions than answers", *The Age*, 5 March 2010, 11.

Murdoch, Lindsay, "Attack on Timorese President unsolved", *Sydney Morning Herald*, 5 March 2010, 13.

Murdoch, Lindsay, "President pardons rebels who shot him", *Sydney Morning Herald*, 10 December 2010, 11.

Murdoch, Lindsay, "Timorese rebel demands back pay", *Sydney Morning Herald*, 1 January 2011, 12.

"PGR Bolu Tan Testamunha Nain 4", *Timor Post*, 21 February 2008, 1, 15.

"PGR: Osan-Mapa Iha Tain Mate Isin Alfredo Iha Uma Horta", *Timor Post*, 26 February 2008, 1, 15.

Philpott, Simon, "Another go at Life: Dili, East Timor" (2007) 10(2) *Theory and Event* [online].

Pires, Angelita, "Statement by Ms Angelita Pires following her acquittal" (3 March 2010).

"PNTL dan UNPol Kejar Penembakan Ramos Horta: Ancaman Hukuman 25 Tahun", *Suara Timor Lorosa'e*, 16 February 2008, 1, 12.

Powell, Sian, "Reinado's last shot at relevance – Timor in crisis", *The Australian*, 12 February 2008, 4.

"Posibilidade Grupus Salsinha Hetan Amnestia", *Timor Post*, 23 February 2008.

"PR Horta Impata Prosesu 11 Fevereiru", *Suara Timor Lorosa'e*, 12 February 2010.

"Prolonga Estadu de Sitio: Aprovado ho 30 votus a favor, 14 abstensaun", *Timor Post*, 15 February 2008, 1, 15.

"Ramos-Horta knowing attacker unconfirmed", *AAP News*, 13 March 2008.

"Ramos-Horta welcomes assassination attempt trials, mulls pardon", *AFP*, 5 March 2009.

Rapoza, Philip, *The Justice System of Timor Leste: An Independent Comprehensive Needs Assessment* (2009).

Report of the United Nations Special Commission of Inquiry for Timor Leste (2 October 2006).

"Reports on Court verdict in Timor subversion case", *East Timor Law & Justice Bulletin*, 4 March 2010.

Roughneen, Simon, "East Timor: Who shot J R Horta?", *Asia Times Online*, 4 December 2008.

Saturday Extra, "East Timor" (transcript), *ABC Radio National*, 16 February 2008.

Security Sector Reform Monitor (SSRM), *Timor Leste* (January 2011, No. 3).

"Seidauk Iha Desizaun Difinitiva TR, Grupu Salsina Labele Hetan Indultu", *Suara Timor Lorosa'e*, 22 April 2010.

"Suspect surrenders in East Timor", *BBC News Online*, 2 March 2008.

"Timor accused fears for safety", *Hobart Mercury*, 15 July 2009, 14.

"Timor president accuses UN troops: Jose Ramos-Horta says troops squandered opportunity to catch gunmen who shot him", *Al-Jazeera*, 28 March 2008.

Toohey, Paul, "Guard's gun didn't kill rebel – AFP report will rock Dili trial of Reinado's lover", *The Australian*, 20 July 2009, 6.

"Tribunal Sei Fo Desizaun Todan Ba Arguidu 11 Febreiru", *Suara Timor Lorosa'e*, 27 February 2008, 1, 11.

UN Division for Public Administration and Development Management (DPADM) and Department of Economic and Social Affairs (DESA), *Democratic Republic of Timor Leste Public Administration Country Profile* (January 2005).

UN HRC, "General Comment 32 (Article 14) Right to Equality Before Courts and Tribunals and to Fair Trial", UN Doc CCPR/C/GC/32, 23 August 2007.

UNMIT, *Text of UNMIT investigation into the shooting of Ramos-Horta* (14 September 2008).

UNMIT, *Periodic Report on Human Rights Developments in Timor Leste: 1 July 2009 – 30 June 2010* (2010).

US Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, *2008 Human Rights Reports: Timor Leste* (25 February 2009).

"Vicente Guterres: Salsinha Rende, PN Sei Fo Amnestia", *Diario Nasional*, 22 February 2008, 1, 11.

Wilson, Lauren, "East Timor President Jose Ramos Horta 'forgives Alfredo Reinado'", *The Australian*, 4 March 2008.